



Laporan Kinerja 2025

*Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Jakarta*

Penanggung Jawab:
Darman, S.Hut., M.Sc.

Further Information
www.bksdadki.com

Lokasi: Cagar Alam Pulau Bokor



Gambar 1. Cerek Jawa (*Charadrius javanicus*) di Taman Wisata Alam Angke Kapuk

Pengantar

Laporan Kinerja 2025
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta

Disusun dan diterbitkan oleh BKSDA Jakarta
Kementerian Kehutanan ©2025

Penanggung Jawab:

Darman, S.Hut., M.Sc.

Pengarah:

Hayunieta, S.Hut., M.P.

Richard Marino Sirait, S.Pi., M.I.L.

Tim Penyusun:

Rachmisanti Hutami, S.T.

Elsa Nurlatifa, S.I.Kom.

Irma Kusuma Ningrum, S.Hut.

Heny Rahayu, A.Md.A.B.

Sri Rachmayanti, S.E.

Penyunting dan Penata Letak:

Elsa Nurlatifa, S.I.Kom.

Dokumentasi:

Rizki Prima, S.Hut.

Dokumen digital Laporan Kinerja ini dapat diakses
dengan memindai QR code berikut:



[Bit.ly/LaporanBKSDAJakarta2025](https://bit.ly/LaporanBKSDAJakarta2025)

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja BKSDA Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini memuat capaian kinerja organisasi berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), realisasi anggaran, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BKSDA Jakarta Tahun 2025–2029.

Sepanjang Tahun 2025, BKSDA Jakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang diarahkan pada penguatan pengelolaan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat, pemulihan ekosistem, penyelamatan tumbuhan dan satwa liar, serta penguatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang berkelanjutan. Capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan hasil yang baik, bahkan pada beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas konservasi di wilayah urban seperti Jakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain tekanan aktivitas manusia, keterbatasan ruang, serta dinamika sosial dan lingkungan yang terus berkembang.



Gambar 2. Bapak Darman, S.Hut., M.Sc. sebagai Kepala Balai KSDA Jakarta

Akhir kata, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan referensi bagi seluruh pihak dalam upaya memperkuat pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja BKSDA Jakarta di masa mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Balai KSDA Jakarta


Darman, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19780909 199803 1 005

KALEIDOSKOP 2025

15

Januari



Field trip AIESEC UI di SM Pulau Rambut.

17

Januari



Monitoring terumbu karang di SM Pulau Rambut

02

Februari



Kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) ke Aviary deHakims

24

Februari



Menhut dan Wamenhut membuka peresmian Aviary Park Indonesia di Tangerang Selatan.

01

Maret



Berbagi kebaikan di sekitar kantor bersama BTN Kepulauan Seribu

18

Maret



Kunjungan Menhut ke TMII dan Jagat Satwa Nusantara

17

April



Halal Bihalal di Kantor Balai KSDA Jakarta bersama jajaran mantan Kepala Balai, mitra dan Irfan Hakim

22

April



Pelantikan pejabat di lingkup Kementerian Kehutanan termasuk BKSDA Jakarta

21

Mei



Pembinaan pegawai lingkup BKSDA Jakarta di SM Pulau Rambut

23

Mei



Dharma Wanita Persatuan BKSDA Jakarta dengan Puskesmas Tambora

02

Juni



Pembinaan CPNS Kementerian Kehutanan lingkup BKSDA Jakarta

19

Juni



Translokasi 25 ekor satwa liar dilindungi dari BKSDA Jakarta ke BKSDA Maluku

17

Juli



Penyuluhan konservasi penyu sisik bersama AIESEC Universitas Indonesia di SM Pulau Rambut

30

Juli



Visit to School ke SD Negeri Johar Baru 09 Pagi untuk mengenalkan satwa langka Indonesia

10

Agustus



Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2025

23

Agustus



Festival Sahabat Mangrove 2025 di TWA Angke Kapuk

14

September



Translokasi satwa menuju Balai TN Ujung Kulon

22

September



Masyarakat Pulau Sabira bersama BKSDA Jakarta membantu penyu sisik kembali ke laut

01

Oktober



Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024

02

Oktober



NusantaraVersary Green Fest dengan kehadiran Menteri LH/Ka. BPLH RI

01

November



Kunjungan Bapak Wamenhut ke TWA Angke Kapuk

19

November



InHouse Training pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL)

12

Desember



3 WNA tersangka selundupkan satwa liar yang dilindungi

23

Desember



Repatriasi 4 Orangutan dari Thailand menuju Indonesia

IKHTISAR EKSEKUTIF



TARGET RO BKSDA JAKARTA 2025



DAFTAR ISI

Pengantar	i	Pengantar
	ii	Kata Pengantar
	iii	Kaleidoskop 2025
	v	Ikhtisar Eksekutif
Bagian 1 Pendahuluan	1	Struktur Organisasi
	2	Tugas dan Fungsi
	5	Sumber Daya Manusia
	7	Isu Strategis
Bagian 2 Perencanaan Kinerja	10	Rencana Strategis 2025-2029
	15	Rencana Kerja 2025
	23	Perjanjian Kinerja 2025
	41	Perjalanan Pagu Anggaran Balai KSDA Jakarta
	42	Pohon Kinerja
Bagian 3 Akuntabilitas Kerja	43	Capaian Kinerja Organisasi
	117	Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran
Bagian 4 Penutup	121	Simpulan umum dan capaian kinerja
	123	Permasalahan dan Langkah ke Depan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

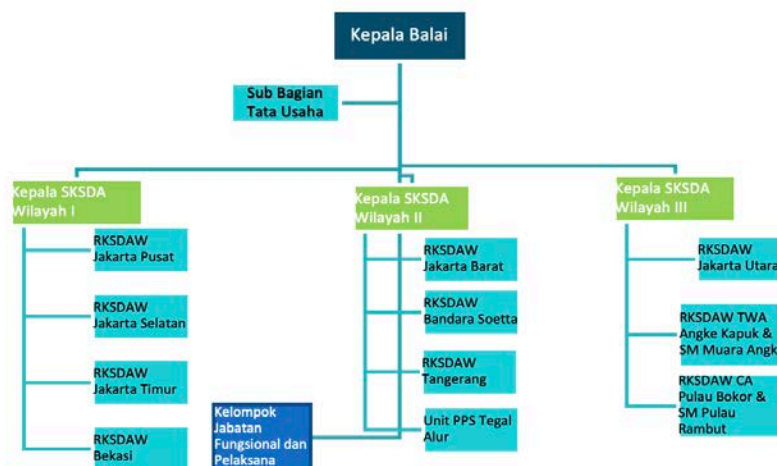
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDA Kelas II tipe A, yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah I;
3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah II;
4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur organisasi Balai KSDA Jakarta terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Wilayah kerja Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I meliputi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II meliputi Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang; dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III meliputi Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Jakarta, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Resort Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah (RKSDAW) yang tersebar di Seksi Wilayah dan 1 (satu) Unit Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur.



Gambar 3. Struktur organisasi BKSDA Jakarta

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam Peraturan Menteri tersebut Balai KSDA Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Balai KSDA menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada

kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
3. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
4. Pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
5. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
6. Pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
7. Pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
8. Pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

9. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
10. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
11. Pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
12. Pelaksanaan penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
13. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
14. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
15. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
16. Pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
17. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
18. Pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
19. Pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
20. Pelaksanaan fasilitasi areal preservasi;
21. Pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
22. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.
23. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
24. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka

- margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
25. pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 26. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
 27. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Secara administratif wilayah kerja Balai KSDA Jakarta seluas 3.759 km² meliputi wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta (650,4 km²), Daerah Tingkat II Tangerang (Kabupaten, Kota, dan Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten (1.414 km²) dan Daerah Tingkat II Bekasi (Kabupaten dan Kota), Provinsi Jawa Barat (1.694,86 km²). Balai KSDA Jakarta mengelola 4 (empat) kawasan konservasi dengan luas total 231,097 ha. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas Cagar Alam Pulau Bokor (18 ha); Suaka Margasatwa Pulau Rambut (90 ha), Suaka Margasatwa Muara Angke (25,02 ha) dan Taman Wisata Alam (99,82 ha).

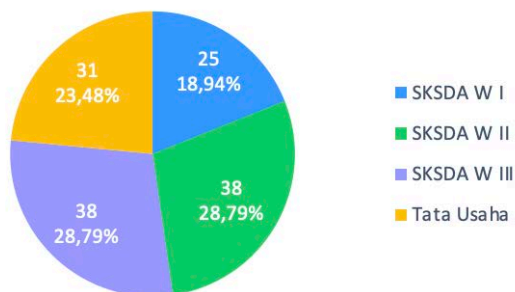


Gambar 4. Kawasan Cagar Alam Pulau Bokor

1.3. Sumber Daya Manusia

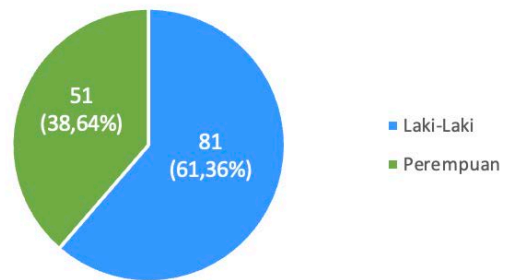
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai KSDA Jakarta sampai dengan akhir tahun 2025 didukung oleh 132 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 97 PNS dan 35 PPPK yang tersebar di 4 (empat) unit eselon IV. Jumlah ini meningkat 48 orang dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN pada Desember 2024. Penambahan tersebut antara lain dari perpindahan pegawai dari satker lain ke BKSDA Jakarta sebanyak 1 orang, penambahan CPNS sebanyak 24 orang, dan penambahan PPPK sebanyak 26 orang, namun terdapat 1 orang pegawai yang pindah ke Direktorat Konservasi Kawasan dan pegawai yang memasuki purna tugas sebanyak 2. Sebaran pegawai ASN Balai KSDA Jakarta masing-masing eselon IV dapat ditunjukkan pada Gambar.

SEBARAN PEGAWAI ASN



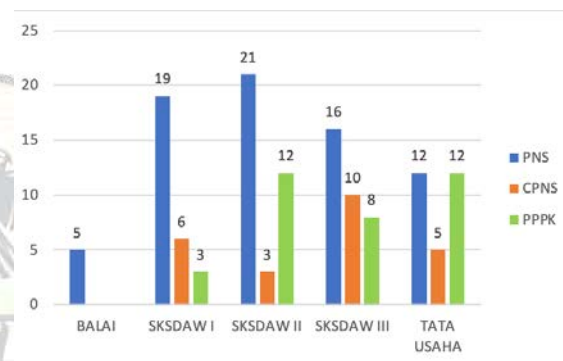
Gambar 5. Jumlah ASN pada setiap Eselon IV Balai KSDA

JENIS KELAMIN PEGAWAI ASN



Gambar 6. Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, proporsi ASN laki-laki sebesar 61,36% (81 orang), sedangkan perempuan 38,64% (51 orang).

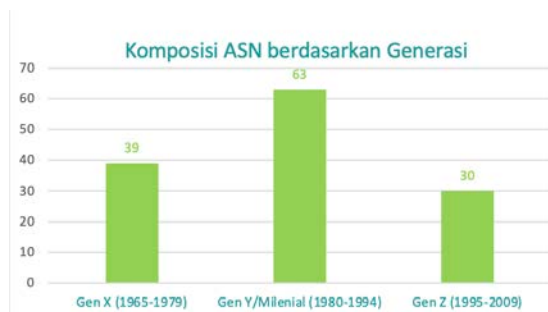


Gambar 7. Komposisi ASN berdasarkan Status Pegawai

Berdasarkan status pegawai, jumlah pegawai pada Balai KSDA Jakarta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan Desember 2025 lebih dari separuh dari total pegawai dan sisanya diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

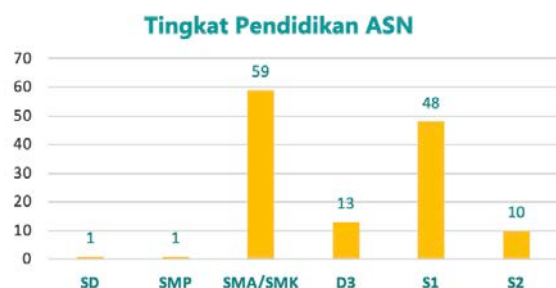
Sebaran generasi pada Balai KSDA Jakarta saat ini dipimpin oleh kelompok generasi Y atau sering disebut generasi milenial hal ini dibuktikan dengan jumlah sebaran generasi milenial sebanyak 63 pegawai, dan terakhir

diduduki oleh generasi Z yakni sebanyak 30 pegawai dapat dilihat pada gambar.



Gambar 8. Komposisi ASN Balai KSDA Jakarta berdasarkan

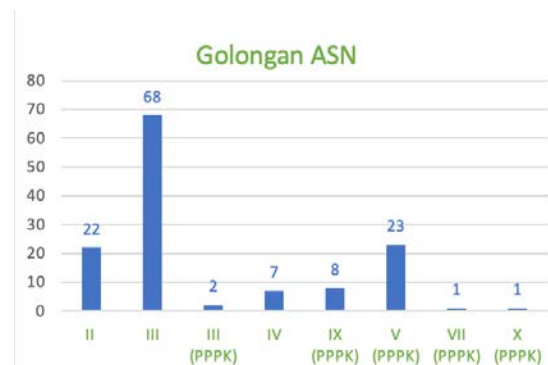
Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN Balai KSDA Jakarta didominasi lulusan SMA/SMK sebesar 44,69% (59 orang), selanjutnya berturut-turut adalah S1 sebesar 36,36% (48 orang), D3 sebesar 9,85% (13 orang), S2 sebesar 7,58% (10 orang), SMP sebesar 0,76% (1 orang) dan SD sebesar 0,76% (1 orang) dapat dilihat pada gambar.



Gambar 9. Komposisi ASN Balai KSDA Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan

Komposisi ASN berdasarkan Golongan, diketahui komposisi tertinggi adalah Golongan III, selanjutnya Golongan V (PPPK), Golongan II, Golongan IX (PPPK), Golongan IV, Golongan III (PPPK), Golongan VII (PPPK) dan

Golongan X (PPPK) dapat dilihat pada gambar.



Gambar 10. Komposisi ASN Balai KSDA Jakarta berdasarkan golongan



Gambar 11. ASN Balai KSDA Jakarta melaksanakan upacara Hari Ibu dan Polisi Kehutanan, 22 Desember 2025.

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Tekanan Antropogenik Terhadap Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Jakarta berada di lanskap pesisir yang telah terbangun secara intensif, sehingga mengalami tekanan antropogenik yang relatif tinggi. Masuknya spesies eksotik, polutan berupa sampah padat, logam berat, material organik dan sedimentasi menjadi faktor-faktor yang memicu degradasi kawasan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sampah laut dan sampah yang terbawa aliran sungai kemudian terakumulasi dan terperangkap di dalam hutan mangrove dapat mengganggu pertumbuhan vegetasi dan menghambat regenerasi pohon.

Sampah juga menyebabkan perubahan perilaku makan satwa liar dan terakumulasi dalam tubuh satwa liar. Burung, monyet ekor panjang dan biawak memakan makanan yang terbawa sampah. Upaya pengendalian sampah anorganik pada tingkat tapak hanyalah upaya jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Penanggulangan sampah laut seharusnya terintegrasi dari bagian hulu, tengah dan hilir agar permasalahan ini bisa diatasi sampai tuntas.

Cemaran polutan (sampah dan lain-lain) dan sedimentasi seringkali

menimbulkan efek domino berupa terhambatnya sirkulasi air laut, sehingga pertumbuhan mangrove tidak optimal. Sirkulasi air laut yang kurang baik juga menyebabkan penurunan salinitas yang berakibat pada semakin agresifnya pertumbuhan spesies invasif. Spesies invasif menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan regenerasi spesies tumbuhan yang diinginkan, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas habitat satwa liar, menghambat sirkulasi air dan pergerakan manusia/satwa liar. Dalam jangka panjang, infestasi spesies invasif secara ekologi akan berdampak negatif pada level spesies, populasi maupun ekosistem.

Tekanan antropogenik lain yang dihadapi di kawasan-kawasan konservasi di Provinsi DKI Jakarta adalah introduksi spesies eksotik/asing. Spesies eksotik dapat mengurangi keutuhan kawasan dan spesies eksotik yang mampu bertahan hidup dan berkembangbiak di dalam kawasan menimbulkan dampak yang lebih berat. Introduksi spesies eksotik tidak hanya mengancam kelestarian kawasan tetapi juga mengancam kelestarian satwa yang diintroduksi. Beberapa jenis satwa liar yang dilepasliarkan dalam tradisi Fang sheng, merupakan jenis yang memiliki status konservasi yang tinggi, seperti biuku (*Orlitia borneensis*) yang dilindungi berdasarkan P.106/2018, kura-kura ambon (*Cuora amboinensis*), kura-kura

tempurung datar (*Notochelys platynota*) dan kura-kura pipi putih (*Siebenrockiella crassicollis*) yang berstatus rentan (*Vulnerable*). Reptilia air tawar ini sebagian besar mati karena tidak bisa hidup di air laut atau air payau.

1.4.2. Penurunan Kunjungan Wisata di TWA Angke Kapuk

Selain isu-isu ekologis, aktivitas wisata di TWA Angke Kapuk belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan wisata di kawasan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan destinasi wisata di sekitar TWA Angke Kapuk yang semakin pesat, cuaca ekstrem dan rob. Hadirnya obyek wisata baru yang menarik dan gratis di Pulau Reklamasi C dan D (Pantai Aloha, Pantai Kita, Pantai Maju dan Pusat Kuliner Pantjoran PIK) memberikan alternatif destinasi wisata yang lebih beragam, sehingga pasar akan semakin terbagi. Di sisi lain, pasang tinggi yang hampir selalu terjadi pada akhir tahun yang merupakan peak season menyebabkan animo masyarakat untuk berkunjung ke TWA Angke Kapuk melemah.

Secara internal, kondisi sebagian sarana prasarana wisata alam di TWA Angke Kapuk mengalami penurunan. Tertag-tertag yang digunakan pengunjung untuk menyusuri kawasan mengalami kerusakan, sehingga mengurangi

kenyamanan pengunjung. Selain itu, pemberlakuan kenaikan tiket masuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan diduga akan berdampak negatif terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Diperlukan strategi untuk mengatasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat kunjungan di kawasan ini, dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas peningkatan sarana dan prasarana dan inovasi obyek dan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata alam TWA Angke Kapuk.

Tren Jumlah kunjungan wisatawan pada TWA Angke Kapuk terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 13. Tren Jumlah Pengunjung TWA Angke Kapuk Tahun 2020-2024

1.4.3. Pemanfaatan dan Peredaran Tumbuhan Satwa Liar

Komoditas tumbuhan dan satwa liar (TSL) masih memiliki daya tarik yang cukup besar sebagai obyek usaha dan wilayah kerja Balai KSDA Jakarta menjadi salah satu jalur utama peredaran dan perdagangan TSL di Indonesia. Oleh karena itu, tugas pengawasan dan pengendalian peredaran TSL masih menjadi prioritas terutama bagi petugas di bandar udara, pelabuhan laut, dan petugas resort yang merupakan jalur lalu lintas TSL antara lain stasiun kereta api, dan terminal bis antar kota. Daerah rawan peredaran TSL ilegal antara lain:

Di bandar udara (Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma), pelabuhan laut (Tanjung Priok dan Muara Baru Jakarta Utara), stasiun kereta api (Jatinegara, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Gambir) dan terminal bis antar kota (Pulogadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres), lokasi perdagangan satwa liar (Pasar Pramuka dan Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Barito dan Pasar Sumenep Jakarta Selatan, sentra burung Kelapa Gading Jakarta Utara, petshop dan pusat perbelanjaan di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta).

Tata kelola dalam pemanfaatan TSL saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2024 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan yang juga memperkuat peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan terbaru tentang pemanfaatan jenis TSL tersebut didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi serta memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya dalam pemanfaatan TSL. Pemanfaatan Jenis TSL dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu Perizinan Berusaha dan Persetujuan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029. Penyesuaian dan penyempurnaan telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar

umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu misi yang terkait langsung dengan Kementerian Kehutanan adalah Misi ke-2 yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat “memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”, Prioritas Nasional keenam “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan “Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan

tujuan sasaran strategis yang menjadi panduan dan pendorong kinerja

tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek

keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (*Red List Index*);
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu,

dan nilai PNPB fungsional kehutanan; serta

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

Dalam mewujudkan visi Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga;
3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Untuk mewujudkan sasaran Direktorat Jenderal KSDAE tersebut, Balai KSDA Jakarta mengimplementasikan melalui 6 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;

5. Kegiatan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi;
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain Direktorat Jenderal KSDAE.

Target Kinerja Balai KSDA Jakarta 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029	Target Kinerja BKSDA Jakarta 2025-2029				
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem							
1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	-	0,678	0,719	0,760	-
2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	20	40	20	20	-
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB							
3	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	4	4	4	4	4
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati							
4	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3	4	4	4	4
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik							
5	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan							
6	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	-	-	-	-	1

7	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	20	30	40	50	60
---	--	----------------------	----	----	----	----	----

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari

8	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Juta Rupiah	91	93	95	97	99
---	---	-------------	----	----	----	----	----

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan

9	Jumlah pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Unit	-	1	1	1	1
---	--	------	---	---	---	---	---

10	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Juta Rupiah	845,149	531,590	781,375	923,049	950,749
----	---	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029	Target Kinerja BKSDA Jakarta 2025-2029				
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
12	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	75,46	100	100	500	100
13	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	4	12	12	12	12

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							
---	--	--	--	--	--	--	--

14	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,9	3,92	3,94	3,97	4,00
----	---	------	-----	------	------	------	------

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

15	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,51	82,71	82,91	83,11
----	--	------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 1. Target Kinerja Balai KSDA Jakarta 2025-2029 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

2.2. Rencana Kerja 2025

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai KSDA Jakarta Tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029. Untuk mencapai target Renstra, Balai KSDA Jakarta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 2 (dua) program yaitu: 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan 2) Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Konservasi Spesies dan Genetik (7269);
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (7270);
3. Konservasi Ekosistem dan

Pembinaan Areal Preservasi (7271);

4. Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (7272);
5. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (7273);
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (7315)

Balai KSDA Jakarta mengemban mandat target kinerja tahun 2025 dari Direktur Jenderal KSDAE yang dirumuskan dalam 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. IKK tersebut diterjemahkan ke dalam Rincian Output (RO) dalam DIPA dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	7272.PEC.001 Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	20 Persen
2	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	7273.QDB.001 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) 7273.REA.002 Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	4 Unit
3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	7273.QDC.001 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati 7273.QDD.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3 Kelompok

4	Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	7270.PEF.001 Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	845.149.000 Rupiah
		7270.QAH.001 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	
5	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	7271.REA.003 Fasilitas Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	75.46 Hektare
6	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	7271.REA.001 Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	2 Hektare
7	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	7269.QDB.001 Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	1 Spesies
		7269.QMA.001 Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	
		7269.REB.001 Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	
8	Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	7269.QAH.001 Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	20 Individu
9	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE		82,31 Poin
10	Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	7315.EBA.956 Layanan BMN 7315.EBA.962 Layanan Umum 7315.EBA.994 Layanan Perkantoran	3,73 Poin

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan



Secara detail program, kegiatan, IKK, RO, Komponen dan target kinerja

Balai Besar KSDA Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Kode	Program/Kegiatan/IKK/RO/Komponen	Target Kinerja
143.04.FE	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
7269	Konservasi Spesies dan Genetik	
7269.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	
7269.QAH.001	Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	1 layanan
7269.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
7269.QDB.001	Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	7 Lembaga
7269.QMA	Data dan Informasi Publik	
7269.QMA.001	Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	1 Data
7269.REB	Konservasi Jenis/Spesies	
7269.REB.001	Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	7 Lokasi
7269.REB.003	Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Spesies Liar	1 Spesies
7270	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	
7270.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	
7270.PEF.001	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	1500 orang
7270.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	
7270.QAH.001	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	2 Dokumen
7271	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	

Kode	Program/Kegiatan/IKK/RO/Komponen	Target Kinerja
7271.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
7271.REA.001	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	2 Hektar
7271.REA.003	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	75.46 Hektar
7272	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	
7272.PEC	Kerja sama	
7272.PEC.001	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1 Dokumen
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	
7273.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	
7273.QDB.001	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	2 Lembaga
7273.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
7273.QDC.001	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	10 Orang
7273.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	
7273.QDD.001	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat
7273.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	
7273.REA.002	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	359 Hektar
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	
7315.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
7315.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
7315.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
7315.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Komponen Kegiatan Tahun 2025 Balai

Program/Aktivitas/IKK		Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)		Komponen Kegiatan/Sub Komponen	
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
7269	Konservasi Spesies dan Genetik	7269.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		
		7269.QAH.001	Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	055	Pemanfaatan dan Peredaran TSL
				A	Pemantauan Pemanfaatan dan Peredaran TSL
				B	Pembinaan Pemegang Perizinan Berusaha Peredaran dan Penangkaran Jenis TSL
				C	Koordinasi Pemanfaatan dan Peredaran TSL
				057	Intervensi Manajemen TSL Bidang Peredaran dan Penangkaran
				A	Pemantauan Pemanfaatan dan Peredaran TSL
				C	Pembinaan Pemegang Perizinan Berusaha Peredaran dan Penangkaran Jenis TSL
				D	Penanganan Konflik Satwa
				E	Koordinasi Penguatan Pemanfaatan TSL
		7269.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
		7269.QDB.001	Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	052	Optimalisasi Pengelolaan LK Umum
				A	Pembinaan dan Monitoring LK
				B	Sosialisasi/Penyadartahuan TSL di Wilayah BKSDA Jakarta
				053	Optimalisasi Pengelolaan LK Khusus
				A	Pakan Satwa
				B	FGD Peyusunan Standard Biaya Khusus Pakan dan Standar daya tampung Kandang Satwa
		7269.QMA	Data dan Informasi Publik		
		7269.QMA.001	Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	052	Survey/Monitoring Keanekaragaman Hayati Lima Taksa
				A	Survey Burung di CA Pulau Bokor
				B	Kegiatan Pendukung Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Havati

Program/Aktivitas/IKK		Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)		Komponen Kegiatan/Sub Komponen	
		7269.REB	Konservasi Jenis/Spesies		
		7269.REB.001	Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	052	Penanganan Satwa Konflik dan Bencana
				A	Penyelamatan satwa
				B	Pelepasliaran Satwa
				053	Penanganan Satwa Transit
				A	Penanganan Satwa Transit
		7269.REB.003	Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Spesies Liar	051	Pengembangan Bioprospeksi
				A	Identifikasi Potensi Bioprospeksi di SM Pulau Rambut melalui wawancara Etnobotani dengan masyarakat Pulau Untung Jawa
				B	Survei Potensi Bioprospeksi di SM Pulau Rambut
7270	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	7270.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi		
		7270.PEF.001	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	054	Penyelenggaraan Social Marketing dan Pemasaran Jasa Lingkungan pada KSA, KPA dan TB
				A	Pameran Forest Healing Festival
		7270.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		
		7270.QAH.001	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	054	Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasling Wisata Alam
				A	Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasling Wisata Alam
7271	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	7271.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
		7271.REA.001	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	051	Pemulihan Ekosistem Daratan melalui Mekanisme Alam
				A	Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem SM Pulau Rambut
				052	Penanaman Intensif
				A	Penanaman dan Pengendalian Tumbuhan Invasif SMPR dan SMMA
				054	Pemeliharaan
				A	Pemeliharaan tanaman T2 dan T3 SM Pulau Rambut
		7271.REA.003	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	051	Fasilitasi Pengembangan pengelolaan Areal Preservasi

Program/Aktivitas/IKK		Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)		Komponen Kegiatan/Sub Komponen	
				A	FGD Pengelolaan Areal Preservasi di Provinsi DK Jakarta
7272	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	7272.PEC	Kerja sama		
		7272.PEC.001	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	051	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati dan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan
				A	Pra Kondisi Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	7273.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
		7273.QDB.001	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	051	Penilaian METT
				A	FGD Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan SMMA dan CAPB (METT)
				B	Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB
		7273.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
		7273.QDC.001	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	051	Fasilitasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan konservasi kawasan dan Keanekaragaman Hayati
				A	Peningkatan kapasitas kader konservasi
				B	Pembinaan Sekolah Adiwiyata
				C	Visit to school
		7273.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
		7273.QDD.001	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	051	Pengembangan Kelembagaan dan Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
				A	Monitoring Desa Binaan
		7273.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		
		7273.REA.002	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	051	Smart Patrol di KSA, KPA dan TB
				A	SMART Patrol di Kawasan Konservasi (Petugas UPT bersama MMP)
				B	Penanganan gangguan kawasan di kawasan konservasi bersama masyarakat
				C	Patroli dan Penjagaan Pelabuhan Tanjung Priok

Program/Aktivitas/IKK		Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)		Komponen Kegiatan/Sub Komponen	
				D	Sosialisasi dan Anjagsana
				E	SMART Patrol dalam rangka pencegahan dan pengendalian karhutla
				F	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri Kehutanan ke Suaka Margasatwa Pulau Rambut
				G	Kunjungan Kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan ke Suaka Margasatwa Pulau Rambut
				H	Pelatihan Menembak
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen				
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	7315.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
		7315.EBA.956	Layanan BMN	051	Layanan BMN lingkup Ditjen KSDAE
				A	Pengelolaan BMN
		7315.EBA.962	Layanan Umum	057	Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis
				A	Penyusunan Rencana Program
				B	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
				D	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
				E	Pengelolaan Data dan Informasi
				H	Layanan Bantuan Hukum
				J	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
				M	Pengelolaan Administrasi Keuangan
				N	Pengelolaan BMN
				O	Tata Usaha dan Kearsipan
		7315.EBA.994	Layanan Perkantoran	001	Gaji dan Tunjangan
				A	Pembayaran gaji dan tunjangan
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
				A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
				B	Langganan Daya dan Jasa
				C	Pemeliharaan Kantor
				D	Honorarium pengelola DIPDA

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Komponen Kegiatan Tahun 2025 Balai



Gambar 15. Taman Wisata Alam Angke Kapuk

Dalam mendukung penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Balai KSDA Jakarta mendapatkan target PNBP TA 2025 sebesar Rp725.650.000,00. Sumber penerimaan negara (PNBP) tersebut berasal dari pendapatan perizinan dan iuran bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta pendapatan wisata alam. Rincian target PNBP per jenis penerimaan sebagai berikut.



Gambar 14. Target PNBP Balai KSDA Jakarta Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Target Kinerja Tahunan Kegiatan Balai KSDA Jakarta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Balai KSDA Jakarta dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdapat 9 sasaran dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam rencana aksi. Berikut disajikan target tahunan pada Balai KSDA Jakarta sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025:

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW I)			
							JAN	FEB	MAR	
1	Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati									
	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, dan akuntabel	20 Persen	Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	20.522.000	1 Dokumen	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-	
2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru									
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	4 Unit	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	22.305.000	2 Lembaga	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-	
				Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	829.805.000	359 Hektar	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-	

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW I)		
							JAN	FEB	MAR
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	3 Kelompok	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	7.535.000	10 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	9.000.000	3 Kelompok Masyarakat	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
3	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								
	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	Nilai PNPB dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	845.149.000 Rupiah	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	33.750.000	1.500 Orang	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
				Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	3.360.000	2 Dokumen	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
4	Kegiatan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi								

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW I)		
							JAN	FEB	MAR
	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	75.46 Hektar	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	20.875.000	75.46 Hektar	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
		Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	2 Hektar	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	19.785.000	2 Hektar	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
5	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik								
	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	1 Spesies	Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	204.345.000	7 Lembaga	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
				Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	84.660.000	1 Data	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Persiapan pelaksanaan kegiatan
				Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	660.140.000	7 Lokasi	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-	-
	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	20 Individu	Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	233.011.000	1 Layanan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	-

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW I)		
							JAN	FEB	MAR
6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE								
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP	3,73 Poin	Layanan BMN	9.628.000	1 Layanan	-	-	-
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	Layanan Umum	275.372.000	1 Layanan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan pelayanan bidang program, kepegawaian, keuangan, dan umum	-
				Layanan Perkantoran	17.013.250.000	1 Layanan	Pembayaran gaji dan operasional perkantoran	-	-

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW II)		
							APR	MEI	JUN
1	Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati								
	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, dan akuntabel	20 Persen	Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	20.522.000	1 Dokumen	-	-	-
2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	4 Unit	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	22.305.000	2 Lembaga	-	-	-
				Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	829.805.000	359 Hektar	-	-	Pelaksanaan kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi di 359 ha

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW II)		
							APR	MEI	JUN
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	3 Kelompok	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	7.535.000	10 Orang	-	-	-
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	9.000.000	3 Kelompok Masyarakat	-	-	Pembentukan tim kerja Monitoring Desa Binaan ke 3 Kelompok Masyarakat
3	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								
	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	845.149.000 Rupiah	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	33.750.000	1.500 Orang	-	-	-
				Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	3.360.000	2 Dokumen	-	-	-
4	Kegiatan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi								

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW II)		
							APR	MEI	JUN
	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	75.46 Hektar	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	20.875.000	75.46 Hektar	-	-	-
		Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	2 Hektar	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	19.785.000	2 Hektar	-	-	Persiapan pelaksanaan kegiatan
5	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik								
	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	1 Spesies	Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	204.345.000	7 Lembaga	-	Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring LK di 1 lembaga	Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring LK di 1 lembaga
				Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	84.660.000	1 Data	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Persiapan pelaksanaan kegiatan
				Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	660.140.000	7 Lokasi	-	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan 1 lokasi	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan 1 lokasi
	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	20 Individu	Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	233.011.000	1 Layanan	-	-	pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pemegang Perizinan Berusaha

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW II)		
							APR	MEI	JUN
									Peredaran dan Penangkaran Jenis TSL
6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE								
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP	3,73 Poin	Layanan BMN	9.628.000	1 Layanan	-	-	-
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	Layanan Umum	275.372.000	1 Layanan	-	-	-
				Layanan Perkantoran	17.013.250.000	1 Layanan	-	-	-

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW III)			
							JUL	AGS	SEPT	
1	Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati									
	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, dan akuntabel	20 Persen	Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	20.522.000	1 Dokumen	-	-	-	
2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru									
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	4 Unit	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	22.305.000	2 Lembaga	-	-	-	
				Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	829.805.000	359 Hektar	Pelaksanaan kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi di 359 ha	Pelaksanaan kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi di 359 ha	Pelaksanaan kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi di 359 ha	

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW III)		
							JUL	AGS	SEPT
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	3 Kelompok	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	7.535.000	10 Orang	-	-	-
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	9.000.000	3 Kelompok Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring Desa Binaan ke 3 Kelompok Masyarakat	Capaian 3 Kelompok Masyarakat	-
3	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								
	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	845.149.000 Rupiah	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	33.750.000	1.500 Orang	-	Pelaksanaan kegiatan Pameran Forest Healing Festival	-
				Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	3.360.000	2 Dokumen	-	-	Pembentukan tim kerja Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasling Wisata Alam
4	Kegiatan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi								

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW III)		
							JUL	AGS	SEPT
	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	75.46 Hektar	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	20.875.000	75.46 Hektar	-	Pembentukan tim kerja Peningkatan Kapasitas Pengelola Areal KEHATI di Luar KSA, KPA, dan TB	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelola Areal KEHATI di Luar KSA, KPA, dan TB
		Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	2 Hektar	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	19.785.000	2 Hektar	Pelaksanaan kegiatan Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem 2 ha	-	-
5	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik								
	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	1 Spesies	Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	204.345.000	7 Lembaga	-	Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring LK di 3 lembaga	Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring LK di 2 lembaga
				Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	84.660.000	1 Data	Pelaksanaan kegiatan Survey Burung	Capaian 1 data Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	-
				Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	660.140.000	7 Lokasi	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan 1 lokasi	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan 1 lokasi

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW III)		
							JUL	AGS	SEPT
							atan 1 lokasi		
	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	20 Individu	Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	233.011.000	1 Layanan	Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pemanfaatan dan Peredaran TSL	-	-
6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE								
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP	3,73 Poin	Layanan BMN	9.628.000	1 Layanan	-	-	-
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	Layanan Umum	275.372.000	1 Layanan	-	-	-

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW III)		
							JUL	AGS	SEPT
				Layanan Perkantoran	17.013.250.000	1 Layanan	-	-	-

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW IV)			
							OKT	NOV	DES	
1	Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati									
	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, dan akuntabel	20 Persen	Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	20.522.000	1 Dokumen	Penyusunan Draft Dokumen capaian Penguatan Fungsi Rencana Kelola Kawasan Konservasi	Penyusunan Draft Dokumen capaian Penguatan Fungsi Rencana Kelola Kawasan Konservasi	capaian dokumen Penguatan Fungsi Rencana Kelola Kawasan Konservasi	1
2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru									
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	4 Unit	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	22.305.000	2 Lembaga	Pembentukan tim kerja FGD Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan	Pelaksanaan FGD Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan	Capaian lembaga Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB	2

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW IV)		
							OKT	NOV	DES
				Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	829.805.000	359 Hektar	Pelaksanaan kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi di 359 ha	Pelaksanaan kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi di 359 ha	Tercapainya 359 ha kegiatan SMART Patrol di Kawasan Konservasi
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	3 Kelompok	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	7.535.000	10 Orang	-	Peningkatan kapasitas kader konservasi	Terbentuknya 10 orang Kader Bina Cinta Alam
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	9.000.000	3 Kelompok Masyarakat	-	-	-
3	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								
	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	845.149.000 Rupiah	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	33.750.000	1.500 Orang	-	-	tercapainya 1.500 orang dalam kegiatan Pameran Forest Healing Festival 1.500 orang

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW IV)		
							OKT	NOV	DES
				Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	3.360.000	2 Dokumen	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasling Wisata Alam 1 dokumen (total 2 dokumen)	-	Tercapainya 2 dokumen kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasling Wisata Alam
4	Kegiatan Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi								
	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	75.46 Hektar	Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	20.875.000	75.46 Hektar	Capaian 75.46 ha yang di Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Areal KEHATI, Tersusunnya Dokumen KEHATI	-	-
		Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	2 Hektar	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	19.785.000	2 Hektar	Pelaksanaan kegiatan Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem 2 ha	Tercapainya 2 ha kegiatan Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem	-
5	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik								
	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	1 Spesies	Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi	204.345.000	7 Lembaga	Capaian 7 lembaga yang dilakukan pembinaan dan monitoring	-	-

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW IV)		
							OKT	NOV	DES
				Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	84.660.000	1 Data	-	-	-
				Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	660.140.000	7 Lokasi	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan 1 lokasi	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan 1 lokasi	capaian 7 lokasi Penyelamatan Satwa
	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	20 Individu	Layanan Penguatan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan	233.011.000	1 Layanan	-	Tercapainya 1 Layanan	-
6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE								
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP	3,73 Poin	Layanan BMN	9.628.000	1 Layanan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi BMN	Tercapainya kegiatan Layanan BMN 1 Layanan

NO	KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN	TARGET RO	TARGET BULANAN (TW IV)		
							OKT	NOV	DES
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31 Poin	Layanan Umum	275.372.000	1 Layanan	-	-	Tercapainya kegiatan pelayanan bidang program, kepegawaian, keuangan, dan umum 1 Layanan
				Layanan Perkantoran	17.013.250.000	1 Layanan	-	-	Tercapainya kegiatan gaji dan operasional perkantoran dalam 1 layanan

Tabel 5. Target tahunan pada Balai KSDA Jakarta sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025



2.4. Perjalanan Pagu Anggaran Balai KSDA Jakarta

Pada awal tahun 2025, Balai KSDA Jakarta mendapatkan alokasi anggaran Rp17.927.785.000. Dalam perjalanannya pagu anggaran Balai KSDA Jakarta mengalami 12 kali revisi anggaran. Terkait revisi anggaran tersebut terdiri dari revisi perihal perubahan nomenklatur, Revisi Efisiensi Belanja APBN Ditjen KSDAE, Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Ditjen KSDAE, Revisi perubahan penarikan halaman III DIPA dan POK, Revisi pemenuhan kebutuhan belanja pegawai secara bertahap, realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai yang dikarenakan adanya penambahan CPNS dan pegawai PPPK.

Adapun perjalanan perubahan pagu anggaran guna pemenuhan kebutuhan belanja pegawai yang semula Rp10.855.435.000, yaitu pada bulan April tahun 2025 Satker Balai KSDA Jakarta merevisi anggaran penambahan belanja

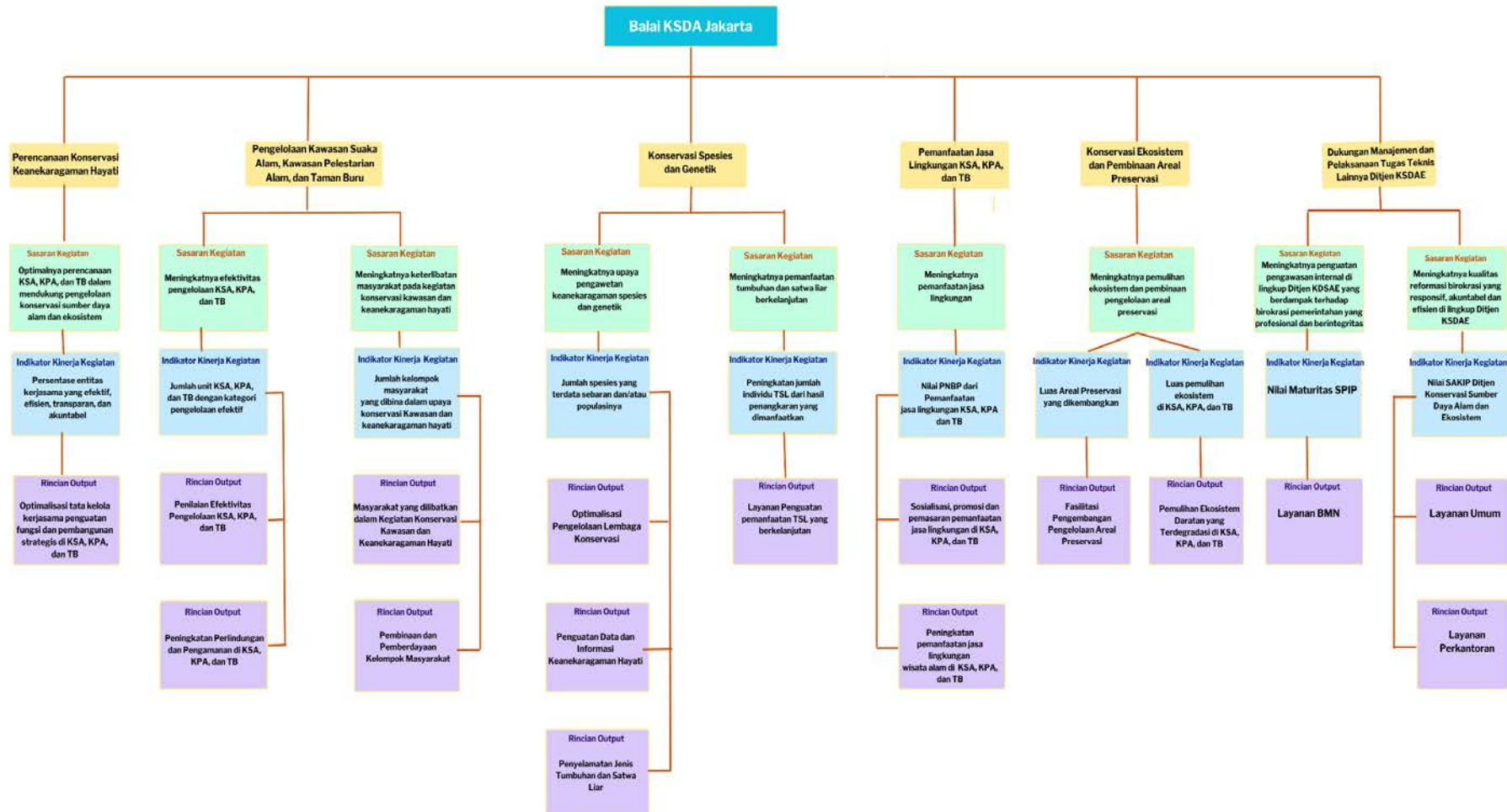
pegawai sebesar Rp662.565.000, sehingga menjadi Rp11.518.000.000 dan pada bulan Agustus ada penambahan lagi pagu belanja pegawai sebesar Rp500.000.000, sehingga menjadi Rp12.018.000.000. Bulan November pemenuhan belanja pegawai tahap ke III terdapat perubahan pagu menjadi Rp19.478.923.000, dengan rincian penambahan belanja pegawai sebesar Rp1.640.000.000, menjadi Rp13.658.000.000, langganan daya dan jasa sebesar Rp11.000.000 dan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp35.000.000. Pada tahap terakhir pemenuhan belanja pegawai pada bulan Desember 2025 mendapat tambahan lagi Rp297.980.000, sehingga menjadi sebesar Rp13.955.980.000.

Penambahan tersebut dengan mengambil dari penghematan kegiatan teknis dan operasional perkantoran sebesar Rp297.300.000. Sampai revisi terakhir pagu total tahun 2025 menjadi Rp19.479.603.000. Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program KSDAE Balai KSDA Jakarta dalam tahun 2025-2029 yaitu:

No	Tahun	Belanja pegawai, Operasional dan Dukungan Manajemen (Rp)	Belanja Non Operasional (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2025	15.612.250.000	2.180.673.000	17.792.923.000
2.	2026	22.682.957.000	1.378.000.000	24.060.957.000
3.	2027	23.817.104.000	1.515.800.000	25.332.904.000
4.	2028	25.007.959.000	1.667.380.000	26.675.339.000
5.	2029	26.258.356.000	1.834.118.000	28.092.474.000
Total		113.378.626.000	8.575.971.000	121.954.597.000

Tabel 6. Kebutuhan Pendanaan Target Kinerja Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029

2.5. Pohon Kinerja



Gambar 16. Pohon Kinerja Balai KSDA Jakarta TA 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. IKK 1. Persentase Entitas Kerjasama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pencapaian IKK persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel didukung oleh 1 (satu) Rincian Output (RO) sebagaimana dalam dokumen PK, yaitu:

- RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Tata kelola kerjasama yang efektif dapat dicapai dimulai dari kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan kewajiban. Dengan kelengkapan dan kedisiplinan ini diharapkan tata kelola kerja sama dapat dicapai. Penentuan kriteria penilaian pada alat ukur tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB

didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu:

- a. Kelembagaan dan kepastian hukum
- b. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama
- c. Transparansi dan akuntabilitas

3.1.1.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

- RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pada tahun 2025, Balai KSDA Jakarta melakukan penilaian tata kelola kerjasama pada 1 entitas yaitu PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Kerja sama antara BKSDA Jakarta dengan PHE ONWJ meliputi penguatan fungsi kawasan konservasi dengan kegiatan dukungan

program konservasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Ramsar Site Suaka Margasarta Pulau Rambut Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Pada tahun 2025, target tahunan IKK ini ditetapkan sebesar 20 persen atau setara dengan 1 entitas kerja sama dari total 5 entitas kerja sama BKSDA Jakarta dengan mitra yang aktif. Realisasi capaian IKK menunjukkan bahwa sebanyak 1 entitas kerja sama telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga capaian kinerja mencapai 20 persen. Dengan demikian, capaian tersebut telah sesuai dan selaras dengan target tahunan yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap entitas PHE ONWJ dengan 19 indikator didapatkan nilai 84,21 yang menunjukkan nilai Baik

3.1.1.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

- ➔ RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Berdasarkan Rencana Strategis BKSDA Jakarta Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Konservasi, pelaksanaan

kegiatan dimaksud telah selaras dengan target yang ditetapkan. Pada periode pelaporan, telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kegiatan. entitas kerja sama yang efektif. Adapun target 100% entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditargetkan tercapai pada tahun 2028.



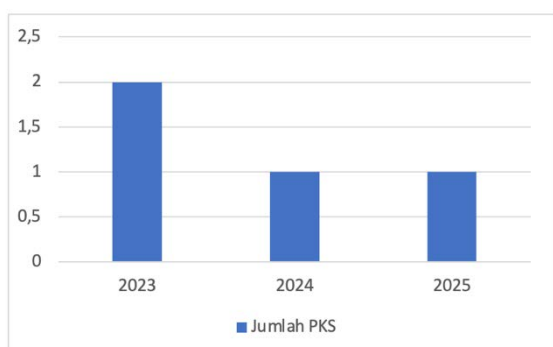
3.1.1.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

- ➔ RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pada tahun 2024, optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) menghasilkan 1 (satu) dokumen. Kegiatan tersebut berupa perjanjian kerjasama antara Balai KSDA Jakarta dengan

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) tentang penguatan fungsi dan konservasi keanekaragaman hayati melalui penanganan konflik manusia dan Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) dan penyadartahuan masyarakat di Suaka Margasatwa Muara Angke dan sekitarnya wilayah kerja Balai KSDA Jakarta, dengan capaian realisasi program dalam RPP sebesar 85.90%.

Pada tahun 2023, terdapat dua perjanjian kerja sama (PKS) yang berakhir sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 1) PKS penguatan fungsi Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai pusat edukasi lingkungan dan restorasi mangrove untuk mendukung pengelolaan ekosistem mangrove terpadu di Jakarta antara Balai KSDA Jakarta dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dengan capaian realisasi program dalam RPP sebesar 95.56%; 2) PKS penguatan fungsi melalui pengembangan wisata alam dan pemasangan pipa instalasi air serta konservasi keanekaragaman hayati di Taman Wisata Alam Angke Kapuk antara Balai KSDA Jakarta dengan PT Multi Artha Pratama dan PT Murindra Karya Lestari.



Gambar 17. Perbandingan data PKS Balai KSDA Jakarta

3.1.1.4. Upaya dan Kendala

➔ RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Balai KSDA Jakarta melakukan pembinaan mitra dan kerja sama (PKS) dengan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), terutama untuk program konservasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Ramsar Site Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, melalui kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta generasi muda tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi rutin untuk memperkuat fungsi konservasi di wilayah DKI Jakarta serta sebagai bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Selama ini, sebagian telur penyu sisik yang berada di Suaka Margasatwa Pulau Rambut kerap gagal menetas akibat dimangsa oleh biawak dan predator lain yang terdapat di kawasan konservasi tersebut. Selain itu, terdapat pula dugaan bahwa sebagian telur diambil oleh oknum masyarakat. Meskipun pulau ini tidak memiliki penduduk tetap, masih terdapat pihak-pihak yang masuk secara ilegal untuk mengambil telur penyu sisik ketika

luput dari pengawasan petugas polisi hutan dan petugas patroli lainnya.

Pasca pembangunan Rumah Penyu selesai yang merupakan bagian dari kerja sama tersebut, Suaka Margasatwa Pulau Rambut di Kepulauan Seribu berkembang menjadi kawasan konservasi semi alami yang berperan penting dalam pemulihan ekosistem penyu. Keberadaan Rumah Penyu didukung oleh sistem penetasan semi alami yang lebih terlindungi serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti kolam pemeliharaan, perangkat kamera pengawas (CCTV), dan pemanfaatan panel surya guna menjamin keberlanjutan kegiatan konservasi. Selain upaya perlindungan dan penyelamatan, program pelestarian penyu sisik ini juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui pelaksanaan kampanye serta pelatihan di bidang konservasi.

Salah satu permasalahan utama di kawasan konservasi ini adalah tingginya volume sampah yang terdampar di pesisir pantai, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan anakan mangrove. PHE ONWJ sudah banyak pula melakukan penanaman mangrove tidak hanya di Pulau Rambut, tapi juga di pulau-pulau lainnya yang ada di gugusan Kepulauan Seribu.



Gambar 18. Penilaian Tata Kelola Kerjasama Bidang

Jenis PKS yang dilakukan yaitu penguatan fungsi kawasan konservasi, dengan periode PKS berlaku hingga 27 Juli 2026. Penilaian Tata Kelola Kerjasama Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sesuai dengan kepatuhan perjanjian kerjasama terhadap peraturan perundang-undangan.

Balai KSDA Jakarta beserta dengan Tim Pendamping dari direktorat

teknis dan mitra PKS melakukan penilaian capaian kerja sama yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025. Penilaian mendapatkan skor 84,21 (baik). Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Pada aspek kelembagaan dan kepastian hukum: telah tersedia dokumen PKS, Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang aktif, sah, dan ditandatangani para pihak. Adanya persetujuan lingkungan, ruang lingkup RPP selaras dengan ruang lingkup PKS dan mencantumkan dukungan manajemen (perencanaan, monev dan pelaporan), program dan kegiatan RKT selaras dengan program di dalam RPP.

b. Pada aspek efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama: output kegiatan dan realisasi anggaran tercapai $\geq 80\%$ (akumulasi capaian output mulai dari RKT 1 s.d. RKT X pada saat penilaian dilakukan); areal kerjasama berada pada lokasi/zona/blok sesuai peruntukannya; monitoring, evaluasi program dan kegiatan kerjasama dilakukan secara rutin dan terjadwal; laporan tahunan

disusun serta terdokumentasi disampaikan ke para pihak.

c. Pada aspek transparansi dan akuntabilitas: skema pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan/atau mengikuti mekanisme yang berlaku pada mitra kerjasama (rekening penampungan dana kerjasama/kemitraan dan atau bukti administrasi pengeluaran oleh mitra); pelaksanaan kegiatan kerjasama menggunakan standar biaya yang berlaku (RAB kegiatan); pengelolaan barang hasil kerjasama terdokumentasi dan dilaporkan secara jelas (berupa BAST); temuan/rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti/diselesaikan.

3.1.1.5. Outcome

➔ RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Meningkatnya kelangsungan hidup dan perlindungan populasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Suaka Margasatwa Pulau Rambut melalui peningkatan penetasan telur, dan penguatan kapasitas pengelolaan

kawasan melalui implementasi perjanjian kerja sama konservasi yang berkelanjutan.

PHE ONWJ turut menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di sekitar lokasi kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Hal ini menjadi simbol bahwa praktik industri migas dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian alam. Dari kegiatan ini perlahan tercipta ekosistem yang lebih baik untuk penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) serta tumbuhan dan satwa liar lainnya yang tumbuh dan berkembang di Suaka Margasatwa Pulau Rambut. Tim Evaluasi bersepakat bahwa PKS dapat diusulkan untuk diperpanjang dan ditingkatkan pencapaiannya.

3.1.1.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

→ RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Target IKK ini adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau diperoleh capaian 100%. Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian IKK ini sebesar Rp20,522,000.00 dan terealisasi sebesar Rp20,500,000.00 atau persentase realisasi

sebesar 99.89% sehingga nilai efisiensi IKK ini sebesar 0.99% (efisien).

3.1.1.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

→ RO 8.2.2: Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan ke depan terkait penilaian tata kelola kerja sama (PKS) pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) sebagai berikut:

a. Pada aspek kelembagaan dan kepastian hukum;

Tidak tersedia dokumen RPK/ToR pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Rekomendasi: agar segera melakukan koordinasi dengan mitra untuk penyusunan dan pengesahan dokumen RPK/ToR setiap kegiatan. 2) Program dan kegiatan di dalam RKT tidak selaras dengan program dan kegiatan di dalam RPP. Rekomendasi: agar segera melakukan koordinasi dengan mitra untuk penyelarasan antara ruang lingkup di RKT dengan di RPP.

- b. Pada aspek efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama;
Jenis/bentuk kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana yang tertuang di dalam dokumen RKT. Rekomendasi: segera menyampaikan klarifikasi perubahan jenis/kegiatan yang tidak sesuai RKT, membuat perencanaan dengan lebih seksama, dan memastikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

3.1.2. IKK 2. Jumlah Unit KSA, KPA, Dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif

Sasaran Strategis: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif disusun untuk mengukur capaian kinerja unit pengelola kawasan konservasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang terencana, terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Pengelolaan efektif mencerminkan kemampuan pengelola kawasan dalam melaksanakan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara seimbang. Pencapaian indikator ini didukung oleh

pelaksanaan 2 (dua) Rincian Output (RO) yaitu:

- a. RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).
- b. RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

3.1.2.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Cagar Alam Pulau Bokor dan Suaka Margasatwa Muara Angke telah dilaksanakan pada 13 November 2025. Proses penilaian dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian METT, yaitu objektif, transparan, dan partisipatif. Implementasi prinsip partisipatif diwujudkan melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di sekitar kawasan konservasi. Stakeholder yang dilibatkan dalam penilaian METT Cagar Alam Pulau Bokor adalah Kepala Desa Tanjung Pasir, sedangkan stakeholder yang dilibatkan

dalam penilaian METT Suaka Margasatwa Muara Angke antara lain Kelurahan Kapuk Muara, Distamhut Prov. DKI Jakarta, Kapuk Muara Animal Rescue, PT Multi Artha Pratama, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).



Gambar 19. Pelaksanaan kegiatan penilaian METT CA Pulau Bokor dan SM Muara Angke Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan

➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

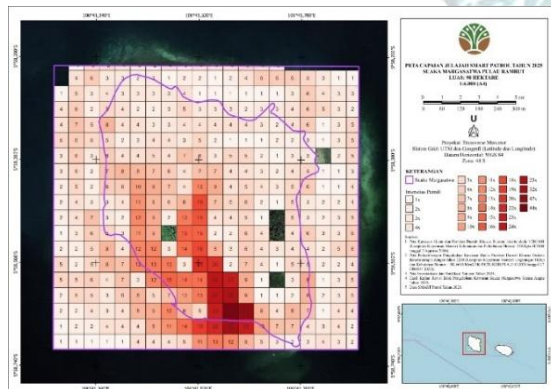
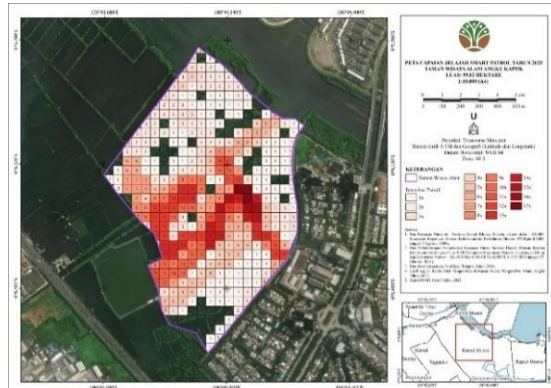
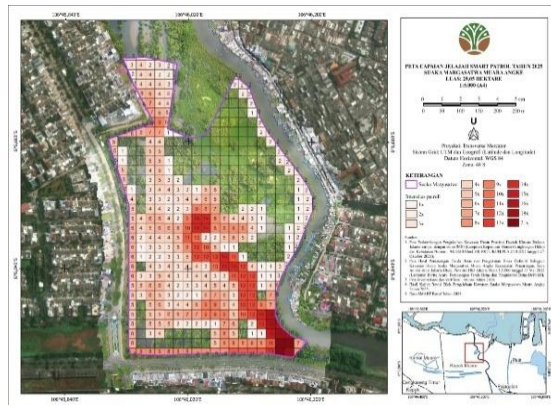
Pencapaian target RO Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam dilakukan melalui kegiatan Patrol di Kawasan Konservasi SM Pulau Rambut, CA Pulau Bokor, SM Muara Angke, dan TWA Angke Kapuk. SMART Patrol memiliki fungsi penting dalam peningkatan perlindungan dan

pengamanan di kawasan suaka alam, khususnya sebagai sarana deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kawasan, seperti perburuan liar, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas ilegal lainnya. Melalui pencatatan data spasial dan nonspasial secara sistematis, SMART Patrol memungkinkan pemantauan kondisi kawasan, keanekaragaman hayati, serta aktivitas manusia secara terukur dan berkelanjutan.

SMART Patrol digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja perlindungan dan pengamanan kawasan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan. Dengan sistem pelaporan yang terstruktur, SMART Patrol turut meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan perlindungan di kawasan suaka alam.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan SMART Patrol, total capaian wilayah adalah 1159.2 hektar melebihi target dalam dokumen PK sebanyak 359 hektar sehingga capaian kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 150% dari target yang direncanakan. Pencapaian yang melampaui target ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengamanan kawasan suaka alam melalui pengawasan yang lebih intensif dan deteksi dini terhadap potensi gangguan. Data hasil patroli yang

terdokumentasi secara sistematis menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian ancaman. Capaian ini mendukung pengelolaan kawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 20. Peta SMART Patrol Kawasan Konservasi

Penanganan Gangguan di Kawasan konservasi (Pengendalian Sampah) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan

Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Muara Angke dan Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk yang didominasi oleh ekosistem mangrove serta Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Cagar Alam Pulau Bokor yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat pesisir dan nelayan. Pada kawasan mangrove, potensi kebakaran meningkat terutama pada musim kemarau akibat penumpukan serasah berupa daun dan ranting kering serta sampah organik yang mudah terbakar yang diperparah oleh aktivitas manusia seperti pembuangan puntung rokok sembarangan. Sementara itu, pada Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Cagar Alam Pulau Bokor, aktivitas nelayan yang berlabuh, beristirahat, dan beraktivitas di sekitar kawasan, termasuk kebiasaan membuang

puntung rokok, turut meningkatkan risiko kebakaran. Faktor pemicu kebakaran pada seluruh kawasan tersebut pada dasarnya relatif sama, yaitu kondisi cuaca kering berkepanjangan, akumulasi bahan bakar alami berupa serasah kering, serta aktivitas manusia yang kurang memperhatikan aspek pencegahan kebakaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan patroli karhutla melalui kegiatan SMART Patrol menjadi langkah preventif mendeteksi potensi kebakaran, memantau aktivitas masyarakat, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadam kebakaran. Pemantauan titik panas (*hot spot*) secara berkala menggunakan aplikasi SiPongi dipadukan dengan patroli lapangan memungkinkan upaya pencegahan karhutla dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga kawasan konservasi tetap terlindungi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 21. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di SM Muara Angke TWA Angke Kapuk dan SM Pulau Rambut

Penanganan Gangguan di Kawasan konservasi (Pengendalian Sampah)

Kegiatan pengendalian dan pembersihan sampah di Suaka Margasatwa (SM) Muara Angke, wilayah Resor Cagar Alam (CA) Pulau Bokor dan Suaka Margasatwa (SM) Pulau Rambut dilaksanakan sebagai upaya menjaga kebersihan kawasan, mencegah penurunan kualitas habitat, serta

mendukung keberlanjutan fungsi ekosistem pesisir dan pulau kecil. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun 2025 dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan tingkat akumulasi sampah di masing-masing lokasi. Di SM Muara Angke, kegiatan bersih sampah dilaksanakan pada area pesisir dan jalur patroli dengan hasil pengumpulan sampah sebanyak 380 karung, yang mencerminkan tingginya tekanan sampah dari aktivitas di sekitar kawasan.

Pelaksanaan kegiatan bersih sampah dilakukan dengan metode pengumpulan langsung di lapangan menggunakan alat bantu sederhana, antara lain sapu, sarung tangan, dan gacok. Sampah yang ditemukan tersebar di area pesisir, sekitar jalur patroli, serta titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi penumpukan, dikumpulkan dan dipusatkan pada satu lokasi pengumpulan sementara. Selanjutnya, sampah yang terkumpul dipilah berdasarkan jenisnya dan dilakukan penimbangan untuk memperoleh data kuantitatif sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Berdasarkan hasil kegiatan, sampah yang berhasil dikumpulkan terdiri atas tiga kategori utama, yaitu sampah organik berupa daun, ranting, dan sisa makanan; sampah anorganik yang meliputi logam, plastik, kaca, dan tekstil; serta sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti limbah baterai, lampu neon,

kaleng cat, limbah kesehatan, dan sisa bahan kimia. Keberadaan sampah B3 menjadi perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan satwa dan kualitas lingkungan kawasan konservasi. Secara kuantitatif, kegiatan pengendalian sampah di SM Pulau Rambut dan CA Pulau Bokor menunjukkan variasi luasan area yang dibersihkan, jumlah karung sampah, serta berat total sampah yang diangkut pada setiap periode pelaksanaan:

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Luas area yang dibersihkan (Ha)	Jumlah sampah (karung)	Berat sampah (kg)
1	19-20 Mei 2025	SM Pulau Rambut	0.17578	1224	3672
2	07-08 Juli 2025	SM Pulau Rambut	0.619	372	2289
3	09-10 Juli 2025	CA Pulau Bokor	0.371	294	785
4	09-10 September 2025	CA Pulau Bokor	-	189	-
5	24 November 2025	SM Pulau Rambut	-	12	-

Tabel 7. Rekapitulasi kegiatan pengendalian sampah di Resor CA Pulau Bokor dan SM Pulau Rambut

Seluruh sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah selanjutnya diangkut dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan kondisi kebersihan kawasan CA Pulau Bokor dan SM Pulau Rambut dapat terjaga, risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan, serta kesadaran akan pentingnya pengendalian sampah di kawasan konservasi dapat terus ditingkatkan.



Gambar 22. Kegiatan bersih sampah SM Muara Angke, CA Pulau Bokor dan SM Pulau Rambut

Patroli pencegahan kebakaran hutan dilaksanakan dua kali oleh petugas Balai KSDA Jakarta dan Masyarakat

Peduli Api sebanyak satu kali dan kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Pelaksanaan SMART Patrol dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui koordinasi lintas pihak serta pengecekan kesiapsiagaan sebelum kegiatan lapangan.
2. Patroli lapangan difokuskan pada pemantauan potensi titik api, kondisi vegetasi dan serasah, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3. Pemantauan titik panas (*hot spot*) dan kondisi cuaca dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi SiPongi sebagai langkah deteksi dini potensi karhutla.
4. Selain patroli, dilakukan pemeriksaan dan uji fungsi peralatan pemadam kebakaran serta simulasi pemadaman api untuk memastikan kesiapan peralatan dan kemampuan respon personel.
5. Hasil patroli menunjukkan tidak ditemukannya titik api, namun teridentifikasi beberapa potensi risiko karhutla seperti tumpukan vegetasi kering, sampah, serta aktivitas pembakaran terbatas yang memerlukan pengawasan.
6. Berdasarkan hasil kegiatan, dilakukan upaya preventif berupa peningkatan pengawasan lapangan, penguatan kesiapsiagaan, serta penyampaian

imbauan kepada masyarakat dan pengunjung guna meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pelatihan Menembak

Latihan menembak selama tahun anggaran 2025 dilaksanakan selama 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari pejabat struktural dan Polisi Kehutanan Balai KSDA Jakarta. Selain latihan menembak, dilaksanakan tes psikologi dan tes kesehatan. Psikotes dilaksanakan di Polda Metro Jaya terdiri dari kecerdasan, kepribadian dan emosional.

Adapun jumlah peserta yang dapat direkomendasikan untuk melanjutkan pembuatan kartu penguasaan pinjam pakai (pengpin) untuk penggunaan senjata api yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang sedangkan sebanyak 6 (enam) orang belum dapat direkomendasikan untuk membuat kartu pengpin dan menggunakan senjata api. Peserta yang belum lolos test tersebut dapat direkomendasikan untuk membuat pengpin apabila dilakukan pengulangan tes dan mendapatkan pendampingan oleh pimpinan.



Gambar 23. Psikotes dan Pelatihan Menembak

3.1.2.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

- ➔ RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Apabila ditinjau berdasarkan Rencana Strategis BKSDA Jakarta Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Konservasi Kawasan, pelaksanaan kegiatan dimaksud telah selaras dengan target yang ditetapkan. Pada periode pelaporan, telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan. Instrumen yang digunakan dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah Management Effectiveness Tracking Tool (METT). yang dilaksanakan pada 2 (dua) unit kawasan, yaitu Suaka Margasatwa Muara Angke dan Cagar Alam Pulau Bokor.

- ➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB).

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), IKK Jumlah Unit KSA, KPA dan TB dengan kategori pengelolaan efektif sebanyak 4 unit kumulatif. Adapun target

Renstra tersebut dicapai dari kegiatan SMART Patrol di empat unit kawasan konservasi yaitu SM Muara Angke, TWA Angke Kapuk, CA Pulau Bokor, dan SM Pulau rambut. Berdasarkan akumulasi realisasi RO tersebut, capaian terhadap target Renstra diperoleh capaian maksimal 100% dari target yang ditetapkan.

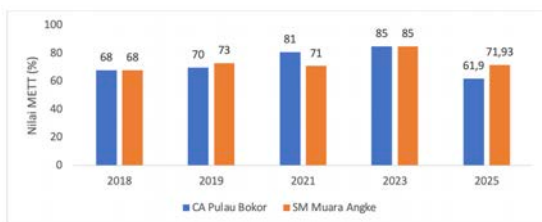
Kegiatan SMART Patrol berkontribusi pada peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan suaka alam, khususnya dalam mendeteksi dini, mencegah, dan menindak berbagai ancaman seperti aktivitas ilegal, gangguan kawasan, serta kebakaran hutan. Selain itu, SMART Patrol mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan melalui penyediaan data patroli yang terukur dan berbasis spasial sebagai dasar pengambilan keputusan, penegakan aturan, dan perencanaan pengelolaan yang lebih tepat sasaran.

3.1.2.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

- ➔ RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai METT CA Pulau Bokor adalah 61,90% sedangkan nilai METT SM Muara Angke adalah 71,93%. Nilai METT CA

Pulau Bokor maupun METT SM Muara Angke cenderung menurun dari periode sebelumnya yaitu tahun 2023 yang bernilai 85%. Penurunan nilai METT tersebut disebabkan oleh perbedaan kriteria dan tingkat ketelitian penilaian pada METT versi 4.0 dibandingkan dengan versi METT sebelumnya. Pada METT versi 4.0 terdapat 38 (tiga puluh delapan) pertanyaan, termasuk beberapa indikator pertanyaan baru, yaitu: (1) keselamatan kerja (*staff safety*); (2) perubahan iklim (*climate change*); (3) tangkapan karbon (*carbon capture*); (4) jasa lingkungan/jasa ekosistem (*ecosystem services*); (5) ancaman (*threats*); (6) koridor atau konektivitas (*connectivity*); (7) kondisi nilai budaya (*condition of cultural values*); (8) status spesies indikator kunci (*detailed assessment of species*); serta (9) status habitat (*detailed assessment of habitat*). Dengan adanya peningkatan standar penilaian tersebut, beberapa indikator yang pada periode sebelumnya memperoleh nilai tinggi mengalami penyesuaian skor, meskipun secara umum kondisi pengelolaan kawasan tidak mengalami perubahan yang signifikan.



Gambar 24. Perbandingan Nilai METT CA Pulau Bokor dan SM Muara Angke

➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pada tahun 2024, pelaksanaan SMART Patrol di kawasan konservasi menitikberatkan pada pengamanan kawasan dan penanganan langsung terhadap berbagai gangguan di lapangan. Pelaksanaan patroli di empat kawasan konservasi dengan fokus pada pencegahan dan penindakan tindak pidana kehutanan, pengendalian gangguan non-tipihut, serta pengumpulan data keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2025, pelaksanaan SMART Patrol mengalami penguatan dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja yang lebih terstruktur. Target pelaksanaan SMART Patrol ditetapkan berdasarkan luasan kawasan sebagaimana tercantum dalam RKAKL Tahun 2025 sehingga capaian kinerja diukur secara spasial melalui grid patroli yang dilalui petugas. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi patroli mencapai 1.159,20 hektar atau melebihi 150% dari target yang ditetapkan (359 hektar). Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan pendekatan ini mencerminkan pergeseran fokus dari sekadar intensitas kegiatan menuju penguatan sistem perlindungan dan pengamanan kawasan

yang lebih terukur, berbasis data, dan mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam.

3.1.2.4. Upaya dan Kendala

➔ RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan menggunakan METT adalah keterbatasan dalam mengundang dan melibatkan para pemangku kepentingan secara optimal. Proses koordinasi lintas instansi memerlukan waktu yang relatif panjang, terutama karena adanya mekanisme administrasi internal dan alur persetujuan yang berjenjang pada masing-masing kelembagaan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya respon terhadap undangan kegiatan, sehingga kepastian kehadiran dan keterlibatan stakeholder tidak selalu dapat diperoleh sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Selain aspek koordinasi, perbedaan tingkat kepentingan, mandat kelembagaan, serta prioritas program masing-masing stakeholder juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan penilaian METT.

Tidak seluruh stakeholder menempatkan kegiatan evaluasi pengelolaan kawasan sebagai prioritas utama, sehingga keterlibatan yang diberikan menjadi bervariasi, baik dari sisi kehadiran fisik maupun kontribusi substantif dalam proses diskusi dan penilaian. Variasi partisipasi tersebut berpotensi memengaruhi kelengkapan perspektif dalam penilaian, meskipun secara umum pelaksanaan METT tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghasilkan gambaran awal kondisi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi pada tahun 2025, BKSDA Jakarta telah melaksanakan berbagai upaya melalui penerapan SMART Patrol di kawasan SM Muara Angke, TWA Angke Kapuk, SM Pulau Rambut, dan CA Pulau Bokor, yang didukung oleh kegiatan pendukung berupa patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan menembak. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan intensitas dan cakupan patroli berbasis grid yang

terukur, pemanfaatan aplikasi SMART untuk pencatatan jalur patroli dan temuan lapangan, penguatan koordinasi internal petugas, serta penggunaan hasil patroli sebagai dasar perencanaan pengamanan lanjutan. Pada aspek pencegahan karhutla, dilakukan pemantauan titik rawan kebakaran dan peningkatan kewaspadaan terutama pada musim kemarau, sementara pada aspek peningkatan kapasitas petugas dilakukan pelatihan menembak sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan pengamanan kawasan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses dan tingkat kesulitan medan akibat karakteristik ekosistem mangrove dan pulau, tingginya aktivitas masyarakat di sekitar kawasan, pengaruh kondisi cuaca, serta keterbatasan sarana pendukung. Pada kegiatan karhutla, kendala berupa potensi titik api akibat vegetasi kering, tumpukan sampah, aktivitas manusia berisiko, serta kondisi sebagian peralatan pemadam yang memerlukan perbaikan masih menjadi tantangan.

Sementara itu, pada pelatihan menembak terdapat keterbatasan jumlah amunisi sehingga evaluasi kemampuan peserta belum optimal, serta masih adanya peserta yang memerlukan pemenuhan persyaratan lanjutan seperti tes psikologi dan latihan tambahan. Kendala-kendala tersebut menjadi perhatian untuk

perbaikan ke depan melalui penguatan sarana prasarana, pemeliharaan peralatan, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan pendukung secara lebih rutin dan berkelanjutan.

3.1.2.5. Outcome

➔ RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Outcome dari kegiatan ini berupa tersusunnya gambaran tingkat efektivitas pengelolaan 2 (dua) kawasan konservasi lingkup BKSDA Jakarta yaitu Cagar Alam Pulau Bokor dan Suaka Margasatwa Muara Angke yang lebih akurat, terukur, dan berbasis standar penilaian terkini, sehingga mampu merefleksikan kondisi riil pengelolaan di lapangan secara lebih komprehensif. Selain itu, pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penilaian telah meningkatkan pemahaman bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi, sekaligus memperkuat komitmen kolaboratif untuk mendukung upaya konservasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan dan sosial. Hasil penilaian METT yang menunjukkan nilai efektivitas pengelolaan

sebesar 61,90% pada Cagar Alam Pulau Bokor dan 71,93% pada Suaka Margasatwa Muara Angke. Nilai tersebut mengindikasikan tingkat efektivitas pengelolaan yang masih memerlukan peningkatan pada sejumlah aspek strategis, sekaligus memberikan arah yang jelas mengenai indikator-indikator prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, hasil METT tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai baseline perencanaan adaptif yang mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

3.1.2.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➔ RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pagu anggaran yang dialokasikan sebagai sumber daya pendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini sebesar Rp12.963.000,00. Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp12.946.000,00, atau

setara dengan 99,87% dari alokasi yang tersedia. Berdasarkan perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran tersebut, diperoleh nilai efisiensi IKK sebesar 0,99, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian IKK ini sebesar Rp 730.733.000,00 dan terealisasi sebesar Rp730.026.205,00 atau persentase realisasi sebesar 99,9%, sehingga nilai efisiensi IKK ini sebesar 0,99 (efisien).

3.1.2.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

➔ RO 9.1.4: Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

No.	Elemen	Rekomendasi
1.	<i>Planning</i>	Pembaruan data keanekaragaman hayati, khususnya satwa kunci dan habitat pesisir, perlu dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dalam laporan resmi. Hasil monitoring tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana kerja pengelolaan kawasan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2.	<i>Input</i>	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia, termasuk penyesuaian pola penugasan petugas agar lebih efektif dalam mendukung perlindungan kawasan.
3.	<i>Process</i>	Meningkatkan intensitas dan kualitas patroli laut dan darat berbasis SMART Patrol yang disertai pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi temuan secara konsisten sebagai bukti proses pengelolaan kawasan.
4.	<i>Outputs</i>	Menyusun laporan rutin hasil kegiatan pengamanan dan monitoring keanekaragaman hayati yang terdokumentasi secara sistematis dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan kawasan.
5.	<i>Outcomes</i>	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap tren gangguan, kondisi habitat, dan respon pengelolaan sebagai dasar penerapan pengelolaan adaptif dan peningkatan efektivitas kawasan secara berkelanjutan.

Tabel 7. Rekomendasi perbaikan penilaian efektivitas pengelolaan

Sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), diperlukan langkah perbaikan yang terukur guna meningkatkan pengelolaan kawasan pada periode berikutnya. Rekomendasi pada penguatan aspek perencanaan, input, proses pengelolaan, serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi adaptif.

➔ RO 9.1.6: Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Ke depan, kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam melalui SMART Patrol perlu didukung dengan penguatan perencanaan patroli yang lebih adaptif dan berbasis risiko sehingga fokus pengawasan dapat diarahkan pada lokasi dan waktu yang memiliki potensi ancaman tertinggi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan lanjutan penggunaan aplikasi SMART, analisis data patroli, serta penanganan gangguan kawasan perlu terus dilakukan agar kualitas patroli semakin optimal. Penyediaan dan pemeliharaan sarana

pendukung patroli juga perlu ditingkatkan untuk mendukung mobilitas dan keselamatan petugas di lapangan. Di samping itu, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat sekitar kawasan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan kawasan secara berkelanjutan.

3.1.3. IKK 3. Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Sasaran strategis: Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Pencapaian IKK jumlah kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati didukung oleh 2 (dua) Rincian Output (RO) sebagaimana dalam dokumen PK, yaitu:

- ➔ RO 10.1.2: Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (PSM).
- ➔ RO 10.1.3: Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (PM).

3.1.3.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

- ➔ RO 10.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati.

Pencapaian target RO “masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati” dilakukan melalui kegiatan pengenalan keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di SM Muara Angke.

Melalui edukasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, kepedulian, serta rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam dan satwa liar di lingkungan sekitarnya. Kegiatan edukasi dan pelibatan kegiatan konservasi dilakukan dengan mengundang perwakilan peserta dari mahasiswa dan dosen salah satu perguruan tinggi di Jakarta, yaitu Politeknik Jakarta Internasional.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengenalan keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi, jumlah peserta yang terlibat mencapai 15 orang, melebihi target dalam dokumen PK sebanyak 10 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 150% dari target yang direncanakan.

Pencapaian yang melampaui target ini diharapkan dapat memberikan dampak

positif terhadap peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya konservasi kawasan dan pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.



Gambar 25. Kegiatan pengenalan keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi

➔ RO 10.1.3. Pembinaan dan Pemberdaya-an Kelompok Masyarakat

Target pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang ditetapkan pada periode pelaporan adalah sebanyak 3 kelompok. Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberdayaan telah dilaksanakan terhadap 3 kelompok

masyarakat, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target tersebut direalisasikan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap kelompok binaan BKSDA Jakarta, yaitu Pokdarwis Puja Berhias, Kelompok Lancang Mania Fish, dan Kelompok Tapas Adidaya. Kegiatan pembinaan dan monitoring bertujuan mengidentifikasi permasalahan, tantangan dan kebutuhan yang dihadapi kelompok binaan di lapangan serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut yang relevan guna perbaikan dan pengembangan program ke depan.



Gambar 26. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kelompok Binaan BKSDA Jakarta

3.1.3.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), IKK Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati menetapkan target lima tahunan sebanyak 3 kelompok. Adapun target Renstra tersebut dicapai selain dari pencapaian kegiatan RO 1 sebanyak 15 orang juga dicapai dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pada RO 2 sebanyak 3 kelompok. Berdasarkan akumulasi realisasi dari kedua RO tersebut capaian yang telah terealisasi adalah sebanyak 18 orang/kelompok sehingga tingkat capaian terhadap target Renstra diperoleh capaian maksimal 150% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan pengenalan konservasi terhadap generasi muda serta kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan pengenalan konservasi berkontribusi pada peningkatan jumlah individu dan kelompok sasaran yang memperoleh pemahaman terkait konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, sementara kegiatan pembinaan/pemberdayaan difokuskan pada penguatan peran kelompok

masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendekatan NTE.

3.1.3.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

➔ RO 10.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Pada tahun-tahun sebelumnya, target terkait masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati menggunakan nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam”. Indikator ini berfokus pada pembinaan individu kader konservasi sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan peningkatan kepedulian terhadap konservasi.

Penetapan target pada IKK “Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam” baru mulai diterapkan pada Tahun 2023 melalui dokumen Renstra 2019-2024 (revisi). Adapun capaian kinerja dengan membandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 27. IKK terkait Bina Cinta Alam Tahun 2023-2025

➔ RO 10.1.3 Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (PM)

Pada tahun-tahun sebelumnya, target Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat menggunakan nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat”.

Adapun capaian kinerja dengan membandingkan terhadap tahun-tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 28. IKK terkait Kelompok/Desa Binaan

3.1.3.4. Upaya dan Kendala

➔ RO 10.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Dalam rangka mencapai target kinerja masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, BKSDA Jakarta secara berkelanjutan melaksanakan berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Pelibatan masyarakat dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kawasan dan keanekaragaman hayati, khususnya di tengah tingginya tekanan antropogenik di wilayah kerja BKSDA Jakarta.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pengenalan konservasi dan keanekaragaman hayati kepada generasi muda dalam bentuk kegiatan bersama mahasiswa dan perwakilan dosen Politeknik Jakarta Internasional di kawasan SM Muara Angke. Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan terkait potensi flora dan fauna di kawasan tersebut. Dengan berjalan melalui *boardwalk* yang ada, peserta mencatat informasi yang disampaikan oleh petugas resor. Selain itu, peserta bersama

dengan petugas melakukan kegiatan pembersihan eceng gondok yang sudah menjadi tumbuhan invasif dan kegiatan penanaman mangrove. Upaya ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai konservasi dan semakin memahami fungsi dan peran kawasan konservasi bagi lingkungan di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan edukasi dan peningkatan kesadaran konservasi sejak dini, BKSDA Jakarta secara konsisten melaksanakan kegiatan *visit to school* yang menasar sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi media strategis untuk memperkenalkan nilai-nilai pelestarian keanekaragaman hayati, peran kawasan konservasi, serta pentingnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan *visit to school* dilaksanakan antara lain di SDN Johar Baru 09 Pagi, SDN Johar Baru 13 dan 15, SDN Kampung Rawa 03, SDN Cempaka Putih Barat 03 Pagi, SMPN 2, SMPN 10, SMAN 10, SMAN 40, SMKN 15, dan SMKN 46. Upaya kegiatan *visit to school* mencerminkan komitmen BKSDA Jakarta dalam memperluas jangkauan edukasi konservasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menanamkan kesadaran berkelanjutan sebagai fondasi perlindungan sumber daya alam di masa depan.

Pelaksanaan kegiatan di atas masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas dan jangkauan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan alokasi anggaran, yang berdampak pada terbatasnya frekuensi kegiatan, jumlah sekolah yang dapat dijangkau, serta intensitas pendampingan terhadap calon kader konservasi. Dari sisi pelaksanaan teknis, keterbatasan waktu pembelajaran di sekolah menjadi tantangan tersendiri.

Jadwal akademik yang padat serta prioritas kurikulum formal menyebabkan waktu yang tersedia untuk kegiatan edukasi konservasi belum maksimal, sehingga penyampaian materi belum dapat dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan latar belakang peserta didik menuntut metode penyampaian yang adaptif, sementara ketersediaan media edukasi dan alat peraga pendukung masih terbatas.

Di samping itu, keberlanjutan pembinaan calon kader konservasi pasca kegiatan *visit to school* masih memerlukan penguatan, mengingat belum seluruh sekolah memiliki mekanisme tindak lanjut atau pendampingan internal yang terstruktur. Tantangan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah juga menjadi salah satu kendala, terutama dalam penyesuaian jadwal kegiatan, kesiapan peserta, serta dukungan sarana

dan prasarana. Pada beberapa kesempatan, kegiatan harus disesuaikan atau ditunda karena adanya kegiatan sekolah lain yang bersifat prioritas.

➔ RO 10.1.3. Pembinaan dan Pemberdaya-an Kelompok Masyarakat

Dalam rangka mencapai target kinerja pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, BKSDA Jakarta telah melaksanakan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat binaan di sekitar kawasan konservasi. Kegiatan pembinaan difokuskan pada peningkatan pemahaman kelompok terhadap kebijakan dan prinsip konservasi, serta pengembangan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, BKSDA Jakarta juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan kelompok binaan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan tindak lanjut pembinaan yang lebih tepat sasaran.

BKSDA Jakarta juga mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat.

Upaya ini dilakukan untuk memperkuat dukungan kebijakan, membuka akses pendampingan lanjutan, serta mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan program pembangunan daerah dan potensi ekonomi lokal berbasis konservasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, BKSDA Jakarta masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi. Kebijakan penghematan anggaran dari Pemerintah berdampak pada upaya pengembangan usaha ekonomi yang akan direncanakan oleh kelompok. Kendala geografis dan aksesibilitas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan pesisir, juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring. Di samping itu, keberlanjutan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat masih memerlukan dukungan lintas sektor yang lebih kuat, terutama dalam hal pengembangan kapasitas usaha, akses permodalan, serta pemasaran produk atau jasa berbasis konservasi.

3.1.3.5. Outcome

Capaian outcome jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati menunjukkan hasil yang positif dan

melampaui target yang ditetapkan. Kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengenalan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati melalui Peran Serta Masyarakat mencapai 15 orang dari target 10 orang, sedangkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (PM) terealisasi sebanyak 3 kelompok dari target 3 kelompok. Capaian tersebut mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya konservasi yang dilaksanakan oleh Balai KSDA Jakarta.

Capaian ini selaras dengan tugas dan fungsi Balai KSDA Jakarta dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya melalui pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan konservasi tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga mendorong terbentuknya kemitraan yang konstruktif antara pengelola kawasan dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian kawasan.

Melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, Balai KSDA Jakarta berupaya memperkuat efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan memastikan kontribusinya terhadap tujuan konservasi dan

pembangunan berkelanjutan. Dengan tercapainya outcome tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perlindungan sumber daya alam hayati di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta.

3.1.3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

→ RO 10.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian target ini sebesar Rp6.935.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.863.270,00 atau persentase realisasi sebesar 98,97%. Jika persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,66 (efisien).

→ RO 10.1.3. Pembinaan dan Pemberdayaan-an Kelompok Masyarakat

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian target ini sebesar Rp9.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp9.000.00,00 atau persentase realisasi sebesar 100%. Jika persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 1,00 (efisien).

3.1.3.7. Rekomendasi Perbaikan

→ RO 10.1.2 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Ke depan, pelaksanaan kegiatan pengenalan konservasi dan keanekaragaman hayati kepada generasi muda serta kegiatan *visit to school* perlu direncanakan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penetapan sekolah dan peserta sasaran perlu mempertimbangkan kedekatan dengan kawasan konservasi serta komitmen pihak sekolah dalam mendukung tindak lanjut kegiatan. Metode penyampaian materi perlu dikembangkan agar lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda, melalui pemanfaatan media edukasi yang variatif.

Selain itu, diperlukan mekanisme tindak lanjut pasca kegiatan, seperti penguatan peran calon kader konservasi di sekolah dan koordinasi dengan guru pendamping, guna menjaga keberlanjutan dampak kegiatan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku

kepentingan terkait serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan capaian kegiatan secara berkelanjutan.

→ RO 10.1.3. Pembinaan dan Pemberdaya-an Kelompok Masyarakat

Ke depan, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat perlu direncanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan dengan penetapan kelompok sasaran yang jelas serta berbasis kebutuhan lapangan. Perencanaan kegiatan diharapkan mampu mengintegrasikan pembinaan teknis, pendampingan kelembagaan dan monitoring secara berkesinambungan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat guna mendukung keberlanjutan pemberdayaan kelompok masyarakat.

Pencatatan terhadap nilai transaksi ekonomi (NTE) juga menjadi hal yang wajib dilakukan oleh kelompok untuk melihat tingkat perkembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh kelompok. NTE juga menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja (IKU) dari Kementerian Kehutanan. Adapun saran/rekomendasi terhadap masing-kelompok dari hasil kegiatan monitoring dan pendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Pokdarwis Puja Berhias agar secara konsisten mendorong pengolahan wisata berkelanjutan yang menggabungkan aktivitas wisata, edukasi lingkungan, sejarah, dan budaya. Selain itu Pokdarwis dengan peran yang strategis dalam pengelolaan wisata di Untung Jawa dapat mensinergikan program kegiatan yang direncanakan dengan konsep desain dan penataan kawasan Pulau Untung Jawa yang telah disusun
- b. Kelompok Tapas Adidaya di Desa Tanjung Pasir agar melaksanakan pengolahan ikan secara fokus dan kontinu. Terkait pengemasan/*packaging* disarankan agar kelompok dapat menjalin kerjasama dan memperoleh pendampingan/fasilitas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Produk bandeng cabut duri dengan potensi nilai jual yang tinggi agar dapat dikelola bersama tidak hanya menjadi usaha perorangan dari anggota kelompok.
- c. Kelompok Lancang Mania Fish yang bergerak dalam usaha perikanan dan pelestarian terumbu karang dapat mengembangkan penjualan dari produk bibit kerapu. Selama ini cukup menjanjikan dan keuntungan yang diperoleh dapat digunakan sebagai modal bergulir untuk pengembangan usaha yang lebih luas lagi. Sementara itu, dalam kegiatan pelestarian lingkungan melalui transplantasi karang agar kelompok secara berkala melakukan monitoring dan pembersihan agar karang yang sudah ditanam dapat tetap hidup dan berkembang.



Gambar 29. Suaka Margasatwa Pulau Rambut

3.1.4. IKK 4. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa lingkungan KSA, KPA dan TB

Sasaran strategis: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari. Pencapaian IKK Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA, dan TB didukung oleh 2 (dua) Rincian Output (RO) dalam dokumen PK, yaitu:

- ➔ RO 12.1.2: Sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB.
- ➔ RO 12.1.3: Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

3.1.4.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB

Dalam rangka mendukung pencapaian RO.12.1.2 terkait kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB, BKSDA Jakarta berpartisipasi dalam kegiatan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) sebagai media penyampaian informasi dan

edukasi kepada Masyarakat. Puncak Peringatan HKAN Tahun 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, secara luring dan daring. Kegiatan ini mengusung tema “Bergerak Bersama Membangun Sinergi Antar Generasi demi Masa Depan Konservasi yang Lebih Baik melalui Peningkatan Manfaat Sosial Hutan dan Mewujudkan Hidup Harmonis Bersama Alam” dengan tagline “*Youth for Conservation, Beyond Expectations*”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menghadapi tantangan konservasi. Rangkaian acara meliputi talkshow bertema konservasi kawasan, penampilan monolog dan deklarasi komitmen generasi muda, pameran produk binaan UPT lingkup KSDAE, serta hiburan seni dan budaya. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, mitra, pelajar, dan generasi muda, serta menghadirkan narasumber dari petugas lapangan, perwakilan Gen Z, dan figur publik.



Gambar 30. Acara talkshow HKAN 2025

Balai KSDA Jakarta berpartisipasi dalam Pameran Konservasi dengan menyelenggarakan stand yang menampilkan informasi keanekaragaman hayati, program-program konservasi, permainan edukatif interaktif, serta produk mitra binaan. Kegiatan interaktif yang disediakan meliputi permainan *spin wheel*, kuis berbasis Quizizz, dan permainan temukan kata, dengan berbagai hadiah menarik seperti kipas, tas belanja, payung, serta voucher kunjungan ke LK Sea World Ancol, Gelanggang Samudra, Jakarta Bird Land, Jakarta Aquarium, BX Sea, dan Fauna Land Ancol.

Dalam pelaksanaannya, stand Pameran BKSDA Jakarta didukung oleh 21 orang penjaga stand yang bertugas sebagai penanggung jawab permainan, promosi produk, penyajian video tayangan, penyediaan welcome drink, serta dukungan teknis lainnya. Selama kegiatan berlangsung, stand BKSDA Jakarta dikunjungi oleh sekitar 192 pengunjung yang didominasi oleh siswa SMA dan mahasiswa di wilayah Jakarta.



Gambar 31. Stand pameran BKSDA Jakarta di HKAN 2025

➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pencapaian target RO "Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)" dilakukan melalui kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasling Wisata Alam. Melalui kegiatan ini diharapkan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya pemegang izin

mampu meningkatkan kepatuhan administrasi, kualitas perencanaan dan pelaporan, optimalisasi pengelolaan usaha wisata alam, serta pemenuhan kewajiban PNBP.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring, jumlah laporan yang dihasilkan adalah sebanyak 2 dokumen sesuai target dalam dokumen PK yaitu 2 dokumen. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang direncanakan. Pencapaian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan sehingga memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan fungsi perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi.

Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam di TWA Angke Kapuk

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam di TWA Angke Kapuk berupa evaluasi rencana kegiatan usaha tahunan yang disusun oleh pemegang IUPSWA dan merupakan penjabaran dari RKL. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember. Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. RKT Tahun 2025 dan pelaporan kegiatan telah disusun dan

disampaikan, namun masih diperlukan peningkatan kualitas penjelasan atas perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan serta anggaran.

2. Sebagian besar kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan, pemanfaatan daya tarik wisata, pengelolaan SDM, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan, meskipun beberapa kegiatan belum terealisasi serta ketidakseimbangan serapan anggaran.
3. Pelaksanaan usaha pariwisata alam berjalan, namun capaian pendapatan dan jumlah pengunjung, khususnya wisatawan domestik, belum mencapai target akibat persaingan destinasi wisata di sekitar kawasan dan keterbatasan ruang aktivitas wisata berbasis konservasi.



Gambar 32. Evaluasi RKT TWA Angke Kapuk



Monitoring Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di TWA Angke Kapuk

Kegiatan monitoring Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di TWA Angke Kapuk dilakukan sebanyak satu kali. Monitoring IPPA yang terlaksana adalah monitoring kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Oktober dengan

fokus pada sarana-prasarana dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan (RKL dan RKT) tersedia dan disahkan, namun masih terdapat keterlambatan penyampaian RKL dan laporan tahunan; pelaporan bulanan dan keuangan telah tertib.
- Pembangunan sarana prasarana wisata sebagian besar telah terealisasi sesuai RKT; pengelolaan kawasan, kebersihan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan, namun aspek keselamatan pengunjung dan akses pengawasan masih perlu ditingkatkan.
- Tidak terdapat pelanggaran peraturan, surat peringatan, maupun tunggakan kewajiban PNBP.
- Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 memperoleh nilai akhir 4,22 dengan kategori SEDANG.



Gambar 33. Monitoring IPPA TWA Angke Kapuk

3.1.4.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB

Terlaksananya 1 (satu) kegiatan pameran Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) merupakan wujud pelaksanaan program yang sejalan dengan Rencana Strategis BKSDA Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Kegiatan pameran ini dirancang sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus memperkenalkan peran dan fungsi kawasan konservasi serta upaya pengelolaan yang telah dilaksanakan.

Selain berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi, pameran HKAN juga menjadi wahana untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKSDA Jakarta dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, mitra konservasi, serta instansi terkait. Melalui penyajian materi konservasi, dokumentasi kegiatan, dan interaksi langsung dengan pengunjung, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan serta mendukung optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan pameran HKAN tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja, tetapi

juga memberikan dampak positif dalam membangun dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), IKK Nilai PNNP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB adalah 91 Juta Rupiah yang terdiri atas kegiatan Pembinaan PB-PSWA ditetapkan sebanyak 2 kegiatan. Berdasarkan akumulasi realisasi dari RO tersebut capaian yang telah terealisasi adalah sebanyak 2 kegiatan yang sehingga tingkat capaian terhadap target Renstra diperoleh capaian 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam serta kegiatan Monitoring Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di TWA Angke Kapuk. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam berkontribusi pada peningkatan kualitas proses perencanaan dan pelaksanaan usaha pariwisata alam sejak tahap perencanaan tahunan. Kegiatan ini berfokus pada

evaluasi Rencana Karya Tahunan (RKT) sebagai penjabaran RKL, serta pembinaan terhadap pemegang izin agar mampu menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih baik, membandingkan rencana dan realisasi, serta memperbaiki pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kegiatan ini bertujuan mendorong perbaikan tata kelola usaha secara preventif dan berkelanjutan melalui penguatan aspek perencanaan, manajemen kegiatan, dan kesiapan implementasi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

Kegiatan Monitoring Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) berkontribusi pada penguatan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja usaha pariwisata alam yang telah berjalan. Kegiatan ini menitikberatkan pada evaluasi kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan perizinan, pemenuhan kewajiban PNBPN, realisasi pembangunan sarana prasarana, pengelolaan kawasan, serta ketaatan terhadap aspek teknis dan administratif melalui penilaian kinerja tahunan. Kontribusi kegiatan monitoring IPPA terletak pada penyediaan dasar objektif untuk pengendalian dan penetapan tingkat kinerja usaha, sekaligus menjadi rujukan pengambilan keputusan pembinaan lanjutan dan peningkatan kualitas pengusahaan pariwisata alam.

3.1.4.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB
- ➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pada tahun 2023, Balai KSDA Jakarta menargetkan IKK Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan konservasi pada 1 destinasi dan berhasil merealisasikannya dengan capaian 150% karena tercapai 3 destinasi (TWA Angke Kapuk, SM Muara Angke, dan SM Pulau Rambut). IPPA di TWA Angke Kapuk pada tahun tersebut dilaksanakan tiga kali, dengan fokus yang beragam mulai dari pengumpulan data flora mangrove untuk pengembangan wisata edukatif, monitoring penyelenggaraan wisata dan PNBPN, hingga evaluasi kondisi sarana prasarana wisata.

Pada tahun 2024, target monitoring IPPA tetap 1 destinasi, namun dari rencana empat kali monitoring hanya terealisasi satu kali akibat kebijakan penyesuaian anggaran, dengan fokus pada kondisi sarana prasarana dan kepatuhan PNBPN.

Pada tahun 2025, target layanan tetap 1 destinasi dan terealisasi 100%, capaian IKK terpenuhi karena didukung oleh 2 dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Monitoring IPPA serta kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam.

3.1.4.4. Upaya dan Kendala

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB

Waktu persiapan pameran HKAN yang relatif singkat menyebabkan beberapa tahapan perencanaan, seperti penyusunan konsep stand, penyiapan materi pameran, serta koordinasi internal, belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, meskipun jumlah petugas penjaga stand relatif memadai, pembagian tugas dan penjadwalan kerja belum tersusun secara jelas, sehingga diperlukan pengaturan alur kerja yang lebih terstruktur. Kemudian, media edukasi yang digunakan masih perlu dipersiapkan secara lebih matang dan optimal agar penyampaian informasi konservasi kepada pengunjung dapat berlangsung lebih efektif. Posisi stand BKSDA Jakarta yang berada di pojok area keseluruhan stand juga menjadi kendala sehingga jarang terjangkau oleh pengunjung HKAN.

- ➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Dalam rangka mencapai target kinerja Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, dilakukan kegiatan pembinaan dan monitoring perizinan berusaha jasa lingkungan wisata alam serta monitoring Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Kegiatan ini meliputi evaluasi dan penilaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang izin, pemantauan pelaksanaan pengelolaan kawasan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana wisata, pengamanan kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta verifikasi pemenuhan kewajiban PNPB. Kegiatan monitoring IPPA meliputi menilai kinerja perusahaan pariwisata alam, mengidentifikasi permasalahan di lapangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kepatuhan dan kualitas pengelolaan usaha wisata alam yang selaras dengan prinsip konservasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala, antara lain rencana dan realisasi kegiatan maupun anggaran yang belum optimal, ketidakseimbangan serapan anggaran antar kegiatan, serta

keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan. Di samping itu, persaingan dengan destinasi wisata di sekitar kawasan berdampak pada belum tercapainya target pendapatan dan jumlah pengunjung. Dari aspek pengawasan dan tata kelola, masih diperlukan peningkatan akses pengawasan lapangan, penerapan sistem kuota dan aspek keselamatan pengunjung, serta perbaikan kualitas pelaporan agar pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.

3.1.4.5. Outcome

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB

Kegiatan pameran Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang dilaksanakan oleh BKSDA Jakarta sebagai sarana sosialisasi dan promosi kelembagaan telah memberikan hasil yang positif dan terukur. Partisipasi aktif pengunjung pada booth BKSDA Jakarta tercermin dari tingginya interaksi langsung, antusiasme terhadap materi edukasi konservasi, serta keterlibatan pengunjung dalam berbagai media informasi yang disajikan. Dampak nyata dari kegiatan ini ditunjukkan melalui peningkatan jumlah pengikut media sosial

BKSDA Jakarta sebanyak 649 followers atau setara dengan 16,3%.

- ➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

3.1.4.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB
- ➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian IKK ini sebesar Rp 3.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.360.000,00 atau persentase realisasi sebesar 100%, sehingga nilai efisiensi IKK ini sebesar 1 (efisien).

3.1.4.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

- ➔ RO.12.1.2 Kegiatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran

pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KSA, KPA, dan TB

- ➔ RO 12.1.3 Peningkatan Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Ke depan, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring IPPA perlu direncanakan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan penjadwalan kegiatan yang jelas serta penetapan fokus evaluasi yang selaras dengan prioritas pengelolaan kawasan. Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan usaha, khususnya RKL dan RKT, perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih realistis, terukur, dan dilengkapi dengan penjelasan yang komprehensif atas deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan maupun anggaran.

Selain itu, penguatan aspek pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama terkait pemeliharaan sarana prasarana, keselamatan pengunjung, dan pengamanan kawasan, perlu menjadi perhatian utama. Diperlukan pula mekanisme tindak lanjut yang lebih sistematis atas hasil monitoring, melalui pembinaan lanjutan dan pendampingan kepada pemegang izin. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara BKSDA Jakarta dengan pemegang izin serta pemangku kepentingan terkait, disertai

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan IPPA serta mendukung pencapaian kinerja dan PNBP secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan fungsi konservasi kawasan.

3.1.5. IKK 5. Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan

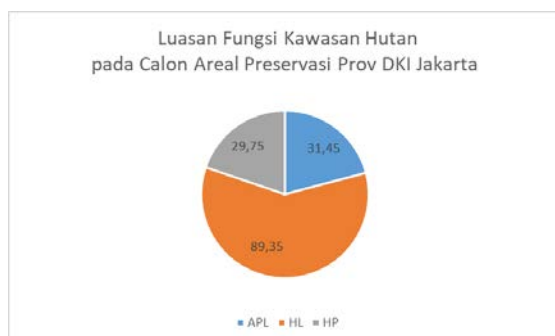
Sasaran Strategis: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi

Disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 memperluas cakupan konservasi dan mengakui Areal Preservasi (AP) sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam pembangunan berkelanjutan. Areal Preservasi merupakan areal di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Areal Preservasi dapat berupa daerah penyangga KSA-KPA, koridor ekologis, areal dengan nilai kehati tinggi, daerah perlindungan kearifan lokal, dan area konservasi kelola masyarakat.

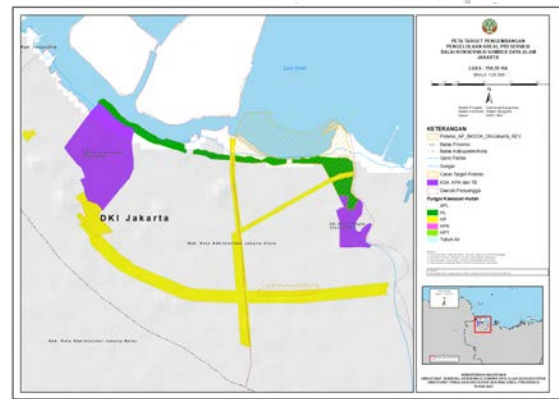
3.1.5.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) luas areal preservasi yang dikembangkan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Dari target yang ditetapkan sebesar 75,46 hektare, realisasi yang dicapai mencapai 150,55 hektare, atau capaian maksimal 150%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil analisis spasial setelah dilaksanakannya kegiatan FGD Pengelolaan Areal Preservasi dimana lokasi AP yang ditargetkan adalah Hutan Lindung dan Hutan Produksi Angke Kapuk dan Dataran lumpur di sekitarnya yang terletak di wilayah Jakarta Utara. Adapun luasan masing-masing sebagai berikut:

- 2) APL seluas: 31,45 Ha,
- 3) Hutan Lindung: 89,35 Ha,
- 4) Hutan Produksi: 29,75 Ha



Gambar 34. Luasan Fungsi Kawasan Hutan pada Calon Areal Preservasi Prov. DKI Jakarta



Gambar 35. Peta Target Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi BKSDA Jakarta

3.1.5.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) luas areal preservasi yang dikembangkan hingga tahun berjalan menunjukkan kontribusi positif terhadap pemenuhan target 5 tahunan (Renstra). Dari target Renstra sebesar 875,46 hektare, realisasi capaian kumulatif yang telah dicapai sebesar 150,57 hektare, atau sekitar 17,20% dari target 5 tahunan. Capaian tersebut mencerminkan progres awal yang cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra, khususnya dalam upaya pengembangan dan penguatan fungsi areal preservasi.

Pengembangan Areal Preservasi dilakukan secara terstruktur dan berbasis data, melalui tahapan prakondisi, pelaksanaan hingga finalisasi berdasarkan kriteria ilmiah sosial, dan mempertimbangkan aturan yang ada. Tahapan awal telah dilakukan yaitu

analisis spasial terhadap calon lokasi areal preservasi berdasarkan sumber data yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang dapat diakses dalam Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) Kementerian Kehutanan dan data lain yang diperoleh dari tingkat lanskap (UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, kementerian/lembaga serta data dan informasi resmi dari mitra kerja terkait lainnya).

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penambahan luasan kawasan yang dilindungi, tetapi juga memastikan pengelolaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat lokal. Pencapaian kegiatan ini mencerminkan kontribusi nyata institusi dalam mendukung target pembangunan nasional, khususnya RPJMN 2025-2029 yang menargetkan pengembangan Areal Preservasi seluas 4 juta hektar. Selain itu, kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan konservasi, perencanaan tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

3.1.5.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) luas areal preservasi yang dikembangkan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut belum dirumuskan dan belum menjadi target kinerja pada periode sebelumnya, seiring dengan belum ditetapkannya areal preservasi sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam pembangunan berkelanjutan.

Penetapan areal preservasi sebagai sistem penyangga kehidupan secara resmi baru memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, sehingga sejak saat itu pengembangan luas areal preservasi mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pengukuran kinerja instansi. Dengan adanya dasar hukum tersebut, indikator ini menjadi instrumen baru dalam mendukung pengelolaan kawasan yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis.

Oleh karena itu, capaian pada tahun berjalan merupakan capaian awal (baseline) yang akan menjadi rujukan bagi evaluasi kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Tata waktu pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu	Anggaran (Rp.)	Sumber
1	Tim Kerja	24 November 2025	0	-
2	FGD Pengembangan Areal Preservasi	27 November 2025	7.567.500	DIPA BKSDA Jakarta 2025
3	Verifikasi lapangan	9 September 2025 dan 1 Desember 2025	0	-
4	Penyusunan profil dan pembuatan peta indikatif areal preservasi	September -Desember 2025	0	-

Tabel 8. Tata waktu dan biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan areal preservasi tahun 2025

Ke depan, indikator luas areal preservasi diharapkan dapat dirumuskan secara lebih terukur dan konsisten, sehingga memungkinkan analisis tren kinerja yang lebih komprehensif serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

3.1.5.4. Upaya dan Kendala

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKK pengembangan areal preservasi adalah penetapan Tim Kerja, Sosialisasi/FGD dengan para pihak, Verifikasi lapangan, penyusunan profil dan pembuatan peta indikatif areal preservasi

Pegumpulan data awal (biofisik, sosial, budaya) telah dilakukan pada tahun 2024 melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan di Sembilan Ruang Terbuka Hijau yaitu Hutan Kota Srengseng, RTH Monumen Nasional (Monas), Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Hutan Kota Munjul, Hutan Kota Buperta Cibubur dan sekitarnya, Hutan Kota Kemayoran, RTH Manggala Wanabakti, Taman Lapangan Banteng serta HL dan HP Angke Kapuk dengan luas total 351,38 ha. Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut, seluruh RTH tersebut teridentifikasi memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, kecuali RTH Gelora Bung Karno.

Dengan mempertimbangkan hasil kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, Balai KSDA Jakarta membandingkan keanekaragaman hayati di setiap RTH. Berdasarkan hasil analisis lanjutan ini, area yang potensial untuk diusulkan menjadi areal preservasi adalah HL dan HP Angke Kapuk beserta dataran lumpur di sekitarnya dan RTH Cibubur. Kemudian hasil analisis lebih mendalam terkait konektivitas habitat, menunjukan bahwa HL dan HP Angke Kapuk beserta dataran lumpur di sekitarnya lebih mendesak untuk diusulkan sebagai areal preservasi.

HL dan HP Angke Kapuk dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, sedangkan dataran lumpur disekitarnya masih berstatus APL dan belum diketahui pengelolanya. Walaupun demikian, secara aktual di lapangan, instansi yang berkegiatan di dataran lumpur tersebut adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta berbagai komunitas yang bergerak di bidang konservasi.



Gambar 36. Inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi di HL dan HP Angke Kapuk dan FGD Pengembangan Areal Preservasi

Untuk menyamakan persepsi terkait pengusulan HL dan HP Angke Kapuk beserta dataran lumpur disekitarnya sebagai areal preservasi, Balai KSDA Jakarta melaksanakan FGD pada tanggal 27 November 2025. FGD ini melibatkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan setempat dan LSM/komunitas pelestari mangrove dan burung air. Verifikasi/survei lapangan dilakukan 2 kali yaitu pada tanggal 9

September 2025 dan 1 Desember 2025. Verifikasi lapangan dilakukan oleh petugas BKSDA Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil FGD disepakati untuk memperluas cakupan usulan areal preservasi dengan menghubungkan titik-titik terluar dataran lumpur. Oleh karena itu, tim kerja melakukan koreksi terhadap peta yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil koreksi tersebut, luas area usulan indikatif areal preservasi adalah 150,55 ha. Penyusunan profil potensi areal preservasi dilakukan dengan memperbarui data berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan studi literatur. Berdasarkan data terbaru (hasil inventarisasi yang dilakukan Burung Laut Indonesia tahun 2025), terdapat peningkatan jumlah spesies bernilai konservasi tinggi yang sebelumnya 5 spesies menjadi 42 spesies.

Salah satu kendala utama dalam pemenuhan target luas areal preservasi yang dikembangkan adalah besarnya target yang ditetapkan, yaitu 875,46 hektare dalam kurun waktu 5 tahun, yang tergolong cukup ambisius apabila dikaitkan dengan karakteristik wilayah Jakarta sebagai kawasan urban dengan tingkat pemanfaatan ruang yang sangat tinggi. Keterbatasan ketersediaan lahan, khususnya kawasan hutan atau ruang terbuka hijau yang masih memiliki potensi ekologis untuk dikembangkan sebagai

areal preservasi, menjadi tantangan struktural yang tidak mudah diatasi. Kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya tekanan pembangunan, alih fungsi lahan, serta kebutuhan ruang untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan.

Akibatnya, ruang yang dapat dialokasikan secara optimal sebagai areal preservasi relatif terbatas dan tersebar, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih inovatif dan kolaboratif. Selain itu, proses penetapan areal preservasi di wilayah urban seperti Jakarta juga membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor yang intensif untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pencapaian target pemenuhan areal preservasi di wilayah Jakarta memerlukan strategi khusus yang adaptif terhadap keterbatasan ruang, termasuk optimalisasi kawasan eksisting, penguatan fungsi ekologis ruang terbuka hijau, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung pencapaian target secara bertahap dan realistis.

3.1.5.5. Outcome

Outcome luas areal preservasi yang dikembangkan menunjukkan capaian yang sangat signifikan, dengan target sebesar 75,46 hektare dan realisasi

mencapai 150,55 hektare. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Balai KSDA Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya dalam penguatan perlindungan kawasan yang memiliki nilai penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Keberhasilan capaian tidak lepas dari kerja sama dan sinergitas dengan para pihak terkait.

Pengembangan areal preservasi nantinya diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan fungsi ekologis di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta, yang didominasi oleh kawasan urban dengan tekanan pemanfaatan ruang yang tinggi. Areal preservasi berfungsi sebagai ruang lindung yang menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat alami, serta mendukung keberlangsungan keanekaragaman hayati, termasuk sebagai area penyangga bagi kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau strategis.

Selaras dengan tugas Balai KSDA Jakarta, pengembangan areal preservasi juga berkontribusi pada pencegahan degradasi lingkungan, pengendalian dampak aktivitas manusia, serta penguatan upaya konservasi berbasis lanskap. Dengan tercapainya outcome tersebut, Balai KSDA Jakarta tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga

memberikan dampak jangka panjang berupa meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta terjaganya fungsi ekologis kawasan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

3.1.5.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian target ini sebesar Rp20.379.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.120.401,00 atau persentase realisasi sebesar 98,73%. Jika persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,66 (efisien).

3.1.5.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengembangan areal preservasi pada Balai KSDA Jakarta, diperlukan sejumlah langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Adapun rekomendasi dalam pengembangan Areal Preservasi dirumuskan pada tabel berikut:

No	Kelompok kegiatan	Kegiatan	Pihak yang dilibatkan
1	Perencanaan	1. Inventarisasi dan monitoring keanekaragaman hayati 2. Penyusunan rencana pengelolaan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, BKSDA Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2	Penguatan Kelembagaan	1. Penerbitan SK Pengeloa areal preservasi 2. Penguatan status/legalitas areal preservasi 3. Pengusulan dataran lumpur di sekitar HL dan HP Angke Kapuk yang berstatus APL sebagai bagian dari HL Angke Kapuk	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, BKSDA Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Direktorat. PEBAB, KSDAE
3	Perlindungan	1. Patroli pengamanan bersama masyarakat 2. Identifikasi dan inventarisasi gangguan kawasan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, BKSDA Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4	Pengawetan	Pembinaan habitat melalui kegiatan: a. Pengendalian sampah anorganik	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, BKSDA Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Komunitas
		b. Penjarangan tanaman c. Pengendalian jenis invasif	Burung Laut Indonesia, Yayasan Lahan Basah Indonesia, Komunitas Lestari Mangrove dan Alam
5	Pemanfaatan	1. Penelitian pengembangan dan ilmu pengetahuan 2. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam 3. Pengembangan wisata <i>bird watching</i>	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, BKSDA Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Komunitas Burung Laut Indonesia, Yayasan Lahan Basah Indonesia, Komunitas Lestari Mangrove dan Alam
6	Penguatan Regulasi	Mendorong areal preservasi masuk ke dalam RTRW daerah.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, BKSDA Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Komunitas Burung Laut Indonesia, Yayasan Lahan Basah Indonesia, Komunitas Lestari Mangrove dan Alam

Tabel 9. Rekomendasi Pengembangan Areal Preservasi

3.1.6. IKK 6. Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB

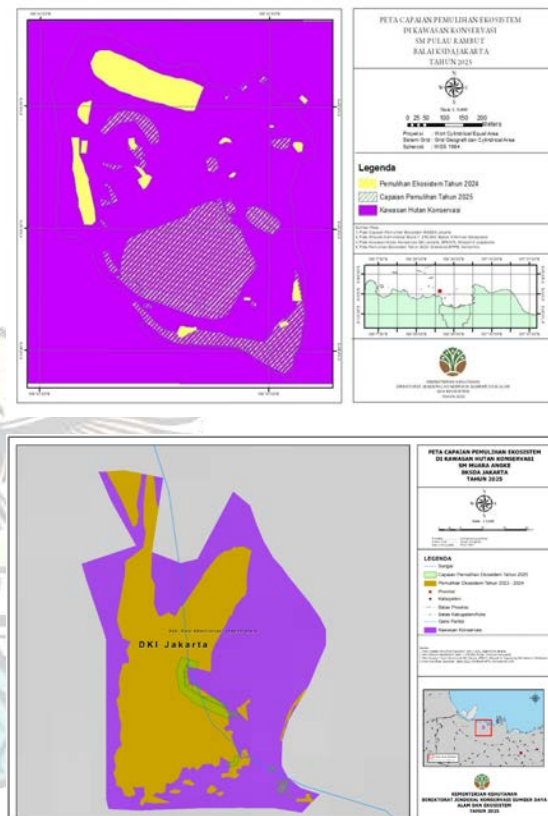
Sasaran Kinerja: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan upaya pemulihan kondisi ekosistem pada kawasan konservasi yang mengalami degradasi atau penurunan kualitas fungsi ekologis. Pencapaian IKK Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB didukung oleh 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RO 13.2.2 terkait Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB.

3.1.6.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Target pemulihan ekosistem didukung oleh kegiatan penilaian keberhasilan PE, pemeliharaan tanaman T2 dan T3 di SM Pulau Rambut, serta penanaman dan pengendalian tumbuhan invasif SMPR dan SMMA. Kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan target tahunan meliputi 1 (satu) kegiatan pemeliharaan tanaman serta 2 (dua)

kegiatan pengendalian tanaman invasif di Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Suaka Margasatwa Muara Angke. Target luasan ekosistem yang dipulihkan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2 Ha dan realisasi pemulihan ekosistem mencapai luasan sebesar 16,046 Ha.



Gambar 37. Peta capaian Pemulihan Ekosistem di SMPR (Atas) dan Peta capaian Pemulihan Ekosistem di SMMA (Bawah)

Kegiatan pemeliharaan tanaman pemulihan ekosistem dilaksanakan pada tanggal Mei 2025 di kawasan hutan dataran rendah SM Pulau Rambut, meliputi area dari sisi barat hingga utara pulau. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan optimal tanaman inti pemulihan serta menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekosistem. Luas pemeliharaan tanaman pemulihan

ekosistem meliputi 2,959 Ha pada T2 dan 2,596 Ha pada T3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada kondisi lingkungan yang relatif sepi dari kehadiran satwa liar, khususnya burung, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas satwa di kawasan tersebut. Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan area dengan radius sekitar 60 cm hingga 1 meter di setiap tanaman inti pemulihan dari gulma, rumput, tumbuhan pencekik, serta tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya. Selain itu, dilakukan pelepasan tanaman inti dari lilitan liana yang menghambat pertumbuhan, pemangkasan tanaman lain di area pemulihan agar tidak melebihi tinggi tanaman inti, serta perbaikan ajir dan label tanaman yang rubuh atau terlepas guna memastikan identifikasi dan pemantauan tanaman tetap berjalan dengan baik.



Gambar 38. Kegiatan pemeliharaan tanaman T2 dan T3 di SM Pulau Rambut

Adapun jenis tanaman yang dilakukan pemeliharaan meliputi Kepuh (*Sterculia foetida*) sebanyak 61 individu, Ketapang (*Terminalia catappa*) sebanyak 4 individu, Bisoro sebanyak 5 individu, Jati pasir (*Guettarda speciosa*) sebanyak 6 individu, Songgo langit (*Tridax procumbens*) sebanyak 4 individu, serta Sawo kecil (*Manilkara kauki*) sebanyak 1 individu. Kegiatan pemeliharaan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman inti, sehingga mendukung percepatan pemulihan ekosistem di SM Pulau Rambut.

Dalam rangka menekan dampak tanaman invasif, telah dilaksanakan kegiatan pengendalian tumbuhan invasif di kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut seluas 9,17 Ha dan di Suaka Margasatwa Muara Angke seluas 0,50 Ha. Di SM Muara Angke, jenis tumbuhan invasif yang dijumpai antara lain eceng gondok (*Eichhornia crassipes*), kiambang (*Salvinia molesta*), apu-apu (*Pistia stratiotes*), rumput malela (*Brachiaria mutica*), dan perumpung (*Phragmites karka*), yang secara signifikan menghambat regenerasi dan pertumbuhan mangrove serta mengurangi luas dan kualitas *feeding ground* bagi burung air. Eceng gondok, khususnya, berkembang pesat pada perairan dengan kandungan bahan organik tinggi dan tingkat salinitas

yang rendah, sehingga berpotensi mempercepat degradasi habitat perairan.

Sementara itu, jenis tumbuhan invasif yang dominan di SM Pulau Rambut meliputi umbi buah (*Dioscorea bulbifera*), duri kretrek (*Guilandina bonduc*), dan kingkit (*Triphasia trifolia*). Keberadaan jenis-jenis tersebut berpotensi menekan pertumbuhan vegetasi asli dan menghambat proses pemulihan ekosistem apabila tidak dikendalikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengendalian tumbuhan invasif menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan kawasan, khususnya untuk mendukung keberhasilan pemulihan ekosistem dan menjaga keseimbangan ekologi di kedua kawasan suaka margasatwa.

Sebagai tindak lanjut pengendalian tumbuhan invasif, dilakukan kegiatan penanaman pengkayaan pada area yang terdampak, khususnya pada lokasi yang dipengaruhi oleh arus laut. Realisasi penanaman pengkayaan di SM Pulau Rambut mencapai 0,057 Ha, sedangkan di SM Muara Angke mencapai 0,051 Ha. Kegiatan penanaman pengkayaan di SM Pulau Rambut dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu oleh Ayo Community pada tanggal 23 Februari 2025 dengan jumlah 1.000 bibit, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Jakarta pada bulan Juli 2025 sebanyak 3.000 bibit, serta DJKN Jakarta pada tanggal 7 November 2025 dengan jumlah 3.000 bibit, sebagai bentuk

kolaborasi multipihak dalam mendukung pemulihan ekosistem kawasan.



Gambar 39. Pengendalian tanaman invasif dan penanaman pengkayaan

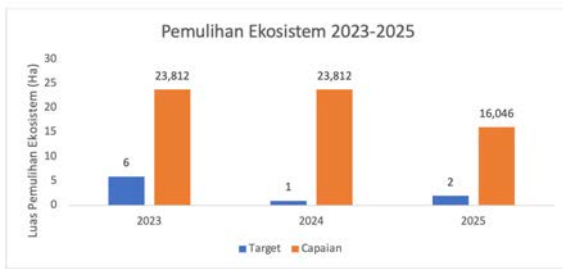
3.1.6.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Pemulihan Ekosistem telah memenuhi target lima tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Target luasan pemulihan ekosistem dalam Renstra ditetapkan sebesar 2 (dua) Ha dan telah berhasil dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman serta pengendalian tumbuhan invasif di kawasan konservasi. Pemenuhan target Renstra tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

program pemulihan ekosistem telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian luasan pemulihan ekosistem secara kuantitatif, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas habitat melalui perbaikan struktur dan fungsi ekosistem, khususnya di Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Suaka Margasatwa Muara Angke.

3.1.6.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Pemulihan Ekosistem menunjukkan kinerja yang konsisten dan melampaui target tahunan pada periode 2023–2025, meskipun terjadi dinamika penetapan target setiap tahunnya. Perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing tahun mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Meskipun capaian realisasi luas pemulihan tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024, capaian tahun 2025 tetap melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung pemulihan ekosistem kawasan konservasi.



Gambar 40. Perbandingan kegiatan pemulihan ekosistem 2023-2025

3.1.6.4. Upaya dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem di wilayah kerja BKSDA Jakarta masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan hasil pemulihan. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya akumulasi sampah laut di area penanaman, khususnya di Suaka Margasatwa Pulau Rambut. Keberadaan sampah laut tidak hanya menghambat pertumbuhan tanaman hasil rehabilitasi, tetapi juga berpotensi merusak struktur habitat serta menurunkan kualitas lingkungan kawasan secara keseluruhan.

Selain itu, tingginya tingkat reinfestasi tumbuhan invasif, seperti gembolo (*Dioscorea bulbifera*) dan eceng gondok (*Eichhornia crassipes*), menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem. Reinfestasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih tertinggalnya umbi udara gembolo di lapangan, laju pertumbuhan spesies invasif yang sangat cepat, serta jalur masuk (pathway) penyebaran yang sulit dikendalikan. Kondisi ini diperparah

dengan dugaan keberadaan seedbank di dalam tanah serta masuknya propagula spesies invasif baru dari luar kawasan, sehingga upaya pengendalian yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan dominasi jenis invasif secara permanen.

Permasalahan lainnya terkait dengan aspek sumber daya, antara lain keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis dalam kegiatan pemulihan ekosistem, kinerja masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang belum optimal, serta keterbatasan alokasi anggaran. Keterbatasan tersebut berdampak pada intensitas dan cakupan kegiatan pemulihan, khususnya dalam pengendalian tumbuhan invasif yang memerlukan upaya berulang dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BKSDA Jakarta telah melakukan sejumlah upaya strategis. Upaya yang dilakukan antara lain pengendalian tumbuhan invasif secara berulang pada lokasi yang sama untuk menekan laju kolonisasi dan reinfestasi, khususnya pada area yang memiliki tingkat gangguan tinggi. Pengendalian dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai bagian dari strategi jangka menengah pemulihan ekosistem.

3.1.6.5. Outcome

Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem pada tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan di Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Suaka Margasatwa Muara Angke. Upaya pemulihan yang dilaksanakan melalui pemeliharaan tanaman, pengendalian tumbuhan invasif, serta penanaman pengkayaan telah mendorong tercapainya luasan pemulihan ekosistem sebesar 16,046 Ha, jauh melampaui target tahunan yang ditetapkan seluas 2 Ha.

Outcome kegiatan pemeliharaan tanaman di SM Pulau Rambut tercermin dari meningkatnya kondisi tumbuh tanaman inti pemulihan pada kawasan hutan dataran rendah, khususnya pada areal sisi barat hingga utara pulau. Pemeliharaan yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 mencakup luasan 2,959 Ha pada tahap T2 dan 2,596 Ha pada tahap T3, dengan fokus pada pengurangan kompetisi vegetasi melalui pembersihan gulma, pelepasan lilitan liana, serta penataan kembali ajir dan label tanaman. tumbuhan invasif yang dilaksanakan di kedua kawasan juga memberikan outcome signifikan dalam menekan faktor penghambat pemulihan ekosistem.

Pengendalian Kegiatan pengendalian pada luasan 9,17 Ha di SM Pulau Rambut dan 0,50 Ha di SM Muara

Angke telah mengurangi dominasi spesies invasif yang berpotensi menurunkan kualitas habitat dan mengganggu proses regenerasi alami. Sebagai tindak lanjut, penanaman pengkayaan pada area terdampak dengan total luasan 0,108 Ha dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan sektor swasta.

3.1.6.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dimaksud, telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp19.763.000,00 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Dari total pagu anggaran yang tersedia, realisasi penggunaan dana mencapai sebesar Rp19.602.500,00 atau setara dengan 99,19%.

3.1.6.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan pemulihan ekosistem, diperlukan perumusan rekomendasi perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja yang telah diraih. Rekomendasi ini disusun untuk mengatasi

berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus memperkuat strategi pemulihan ekosistem agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan pada periode pelaksanaan berikutnya.

Peningkatan kompetensi tenaga pelaksana kegiatan pemulihan ekosistem perlu menjadi perhatian utama melalui penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis tenaga pelaksana, khususnya terkait teknik pemulihan ekosistem, pengendalian tumbuhan invasif, pemeliharaan pascapenanaman, serta pemantauan dan evaluasi keberhasilan kegiatan. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan dapat lebih optimal sehingga hasil pemulihan ekosistem dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan penyusunan panduan penilaian keberhasilan pemulihan ekosistem, khususnya pada ekosistem perairan dan lahan basah, sebagai acuan yang baku dan seragam dalam pelaksanaan evaluasi. Panduan tersebut diharapkan memuat indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan relevan dengan karakteristik ekosistem, baik dari aspek struktur maupun fungsi ekosistem. Keberadaan panduan ini akan mendukung pelaksanaan penilaian yang lebih objektif, konsisten, dan dapat dibandingkan antar

lokasi serta antar periode waktu, sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan kawasan.

Pengalokasian anggaran kegiatan pemulihan ekosistem juga perlu mempertimbangkan luas capaian pemulihan yang telah dilakukan serta kebutuhan kegiatan lanjutan dari pemulihan ekosistem pada tahun-tahun sebelumnya. Mengingat pemulihan ekosistem merupakan proses jangka menengah hingga panjang yang memerlukan pemeliharaan dan pengendalian lanjutan secara berulang, perencanaan anggaran yang berbasis keberlanjutan menjadi sangat penting. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan proporsional, hasil pemulihan ekosistem yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

3.1.7. IKK 7. Jumlah Spesies yang Terdata Sebaran dan/atau Populasinya

Target IKK ini adalah sebanyak 7 lembaga dan terealisasi sebanyak 7 lembaga atau diperoleh capaian 100%. Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian IKK ini sebesar Rp197,250,000.00 dan terealisasi sebesar Rp196,790,900.00 atau persentase realisasi sebesar 99.77% sehingga nilai efisiensi IKK ini sebesar 0.99% (efisien). IKK pada BKSDA Jakarta didukung oleh 3 (tiga) RO yaitu:

- ➔ RO 14.1.1. Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi
- ➔ RO 14.1.2. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati
- ➔ RO 14.1.5. Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

3.1.7.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

- ➔ RO 14.1.1. Optimalisasi Pengelolaan Lem-baga Konservasi

Dari target yang ditetapkan sebanyak 7 Lembaga Konservasi (LK), realisasi yang dicapai juga sebanyak 7 LK, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dari target tahunan. Kegiatan dalam mendukung capaian IKK dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring LK yang menjadi mitra BKSDA Jakarta yaitu; Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, Fauna Land, Jakarta Aquarium Indonesia, Aviary Park, dan BXSea.

No.	Nama Unit Lembaga Konservasi	Nomor SK/Izin dan Tanggal Terbit Ijin	Alamat	Keterangan
1.	PT. Taman Impian Jaya Ancol	SK.405/Menhut-II/2004 18 Oktober 2004	Jl. Lodan Timur No.7, Ancol, Jakarta Utara	Lembaga Konservasi Ex-Situ Satwa Liar
2.	Taman Margasatwa Ragunan	SK.253/Menhut-II/2007 6 Agustus 2007	Jl. Harsono RM No.1 Ragunan, Jakarta Selatan	Lembaga Konservasi dalam bentuk kebun binatang
3.	Taman Mini Indonesia Indah	SK.229/Menhut-II/2010 15 April 2010	Jl. Raya Taman Mini, Kel.Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	Lembaga Konservasi dalam bentuk taman satwa
4.	PT. Fauna Land Ancol	No. 1/1/ILK/PMA/2016 13 April 2016	Kawasan Wisata Ecopark- Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara	Lembaga Konservasi dalam bentuk taman satwa
5.	PT. Jakarta Aquarium Indonesia	No. 3/1/ILK/PMDN/2017 3 April 2017	Gedung Neo Soho Lantai LG 101 & LGM 101, Jl. Letjen S.Parmar Kav.28 Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat	Lembaga Konservasi dalam bentuk taman satwa
6.	PT Jaya Real Property, Tbk	Perizinan Berusaha No. Izin: 81201181507590049 19 Januari 2023	Mall Bintaro Jaya Xchange 2, CBD Bintaro Jaya Blok O, Desa/ Kelurahan Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,	Lembaga Konservasi dalam bentuk taman satwa
7.	PT Aviary Jaya Lestari	Perizinan Berusaha No. Izin: 12450006328540008 19 Maret 2024	Bintaro Creative Village Bintaro Jaya Sektor 3A, Desa/Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Lembaga Konservasi dalam bentuk taman satwa



Gambar 41. Mitra Lembaga Konservasi Balai KSDA Jakarta

Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap lembaga konservasi telah dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Optimalisasi pengelolaan dilakukan melalui penerapan standar pengelolaan lembaga konservasi, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kewajiban, serta penguatan fungsi lembaga konservasi dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Keberhasilan pencapaian target tersebut juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara Balai KSDA Jakarta dengan pengelola lembaga konservasi, serta komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan konservasi.



Gambar 42. Pembinaan LK JAI (atas) dan LK Aviary Park (bawah)

Selain itu BKSDA Jakarta juga mengelola Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) yang merupakan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus. PPS yang berada di Tegal Alur tersebut merupakan tempat perawatan sementara satwa-satwa dilindungi yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat dan penitipan penegakan hukum di bidang kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Selain itu, PPS juga melakukan perawatan sementara satwa-satwa tidak dilindungi yang berasal dari kejadian konflik satwa dengan masyarakat.

Satwa-satwa tersebut dirawat di PPS sesuai prinsip kesejahteraan satwa (*animal welfare*) yang dikenal dengan istilah *Five of freedoms*, yaitu: 1) *Freedom from hunger* (bebas dari rasa lapar dan haus), 2) *Freedom from discomfort* (bebas dari rasa ketidaknyamanan lingkungan), 3) *Freedom from pain, injury and disease* (bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit), 4) *Freedom from fear and distress* (bebas dari rasa takut dan tertekan), dan 5) *Freedom to express normal behavior* (bebas untuk mengekspresikan perilaku alami).

Prinsip kesejahteraan satwa tersebut diwujudkan dalam pengelolaan PPS Tegal Alur. Pada tahun 2025, PPS Tegal Alur telah melakukan kegiatan pemberian pakan dan minum satwa, perawatan kandang, pemberian obat dan vitamin serta pemeriksaan kesehatan

satwa. Pemeriksaan kesehatan petugas pengelola PPS Tegal Alur juga dilakukan untuk mencegah penyakit zoonosis berupa *Medical Check Up*.

- ➔ RO 14.1.2. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati
- ➔ RO 14.1.5. Penyelamatan Jenis Tumbu-han dan Satwa Liar

Upaya penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta kelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kegiatan pelepasliaran atau translokasi satwa, yaitu pemindahan tumbuhan dan satwa liar dari lokasi yang tidak aman atau tidak sesuai ke habitat alaminya. Sebelum dilepasliarkan, satwa melalui tahapan pemeriksaan kesehatan, identifikasi jenis, penilaian kelayakan habitat, serta proses rehabilitasi apabila diperlukan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang dilepasliarkan berada dalam kondisi sehat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan alaminya.

Pelepasliaran dilakukan di habitat yang sesuai dengan karakteristik ekologis masing-masing jenis, dengan mempertimbangkan ketersediaan pakan, tutupan vegetasi, serta tingkat gangguan manusia. Kegiatan ini melibatkan berbagai

pihak, antara lain satker KSDAE di Indonesia, Balai Karantina, maskapai penerbangan, masyarakat sekitar, serta mitra konservasi, guna memastikan proses berjalan secara aman dan berkelanjutan.

Lokasi pelepasliaran adalah taman nasional dan kawasan konservasi yang berada dibawah pengelolaan Balai KSDA. Dalam kurun Januari s/d Desember 2025 sudah dilaksanakan translokasi/ pelepasliaran dan penitipan satwa sebanyak 18 kali kegiatan dengan 236 jumlah individu. Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 7 lokasi sehingga capaian kinerja maksimal sebesar 150%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan translokasi di lapangan.

Tujuan translokasi tahun 2025 antara lain BBKSDA Papua, TN Ujung Kulon, BKSDA Jambi, BKSDA Maluku, BKSDA Sumatera Selatan, TN Bukit Barisan Selatan, TN Meru Betiri, dan LK/mitra di wilayah BKSDA Jawa Barat. Jika dibreakdown per spesies, maka yang terbanyak kadal lidah biru (53 ind.), sancan batik (37 ind.), kakatua toki (17 ind.) sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tujuan	Sum Tujuan	Sum of Jumlah
Balai Besar KSDA Papua	4	83
BKSDA Jambi	1	26
BKSDA Maluku	2	50
BKSDA Sumsel	2	4
Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK)	1	4
SM Muara Angke	2	21
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	1	15
Taman Nasional Meru Betiri	1	5
Taman Nasional Ujung Kulon	2	22
The Aspinall Foundation Ciwidey	1	4
YIARI (Bogor)	1	2
Grand Total	18	236

Tabel 10. Lokasi Tujuan Translokasi Satwa dari BKSDA Jakarta tahun 2025

No.	Jenis Satwa	Jumlah (ekor)	No.	Jenis Satwa	Jumlah (ekor)
1	Berang berang cakar kecil	7	23	Kucing Kuwuk	1
2	Biawak Coklat	1	24	Kukang	1
3	Biawak Ekor Biru	1	25	Kukang Jawa	1
4	Boa Tanah	4	26	Kura-kura ambon	11
5	Buaya siam	2	27	Labi-Labi Moncong Babi	3
6	Cica Daun Besar	2	28	Lutung Jawa/Lutung Budeng	4
7	Cica daun sayap-biru sumatera	7	29	Mambruk Victoria	1
8	Decu belang	12	30	Monyet Ekor Panjang	1
9	Elang Bido	1	31	Nuri bayan	4
10	Elang Bondol	1	32	Nuri Maluku	4
11	Elang Brontok	1	33	Owa siamang	2
12	Elang Brontok Fase Gelap	1	34	Owa Ungko	1
13	Elang Paria	1	35	Perkici lembayung	3
14	Elang Tikus	4	36	Perkici Pelangi	7
15	Jalak putih-sayap hitam	2	37	Sanca batik	37
16	Kacamata biasa	5	38	Sanca Bulan	2
17	Kadal lidah biru	53	39	Serindit Melayu	1
18	Kakatua Koki	17	40	Soa Payung	4
19	Kakatua Putih	1	41	Takur Api	7
20	Kakatua Tanimbar	1	42	Takur warna warni	1
21	Kasturi Kepala Hitam	11	43	Tiong emas	4
22	Kasturi Ternate	1	Grand Total		236

Tabel 11. Jenis Satwa yang ditranslokasikan pada tahun 2025



Gambar 43. Kegiatan Translokasi Tahun 2025

Melalui kegiatan pelepasliaran (translokasi), diharapkan populasi tumbuhan dan satwa liar dapat kembali berfungsi secara alami di ekosistemnya, sekaligus mengurangi potensi konflik dengan manusia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati. Dengan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan, penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keseimbangan ekosistem dan generasi mendatang.

3.1.7.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

➔ RO 14.1.1. Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Jumlah spesies yang terdata sebaran

dan/atau populasinya merupakan salah satu indikator strategis dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis data dan informasi. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), target lima tahunan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebanyak 25 spesies. Pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui Rincian Output Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati.

➔ RO 14.1.2. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

Seperti disebutkan sebelumnya, pencapaian target IKK Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya dilaksanakan melalui Rincian Output Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati yang difokuskan pada kegiatan inventarisasi, pendataan, dan penguatan basis data sebaran serta populasi spesies prioritas. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, proses pengumpulan dan pengolahan data spesies dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, metode survei, serta tingkat prioritas spesies yang menjadi sasaran pendataan.

Capaian yang diperoleh hingga tahun berjalan menunjukkan kontribusi nyata terhadap pemenuhan target lima tahunan Renstra. Data sebaran dan/atau populasi spesies yang telah terhimpun

menjadi dasar penting dalam mendukung perencanaan pengelolaan konservasi, pengambilan kebijakan berbasis ilmiah, serta evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Dengan sisa target yang masih harus dipenuhi, diperlukan kesinambungan pelaksanaan kegiatan penguatan data dan informasi agar target lima spesies sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara optimal dalam periode perencanaan (data dari laporan kegiatan survei burung)

➔ RO 14.1.5 Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya merupakan indikator yang mengukur hasil kegiatan pendataan dan pengumpulan informasi ilmiah terkait sebaran serta kondisi populasi spesies di habitat alamnya. Indikator ini berfokus pada ketersediaan data dan informasi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pencapaian target IKK tersebut tidak bersumber dari kegiatan rincian output Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, karena kegiatan penyelamatan pada prinsipnya ditujukan untuk penanganan langsung terhadap individu atau kelompok Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang

berada dalam kondisi terancam, konflik, atau memerlukan tindakan darurat. Kegiatan tersebut tidak secara spesifik dirancang untuk menghasilkan data sebaran dan/atau populasi spesies secara sistematis.

Meskipun kegiatan Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar berkontribusi secara tidak langsung dalam menjaga keberlangsungan spesies, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya dicapai melalui kegiatan pendataan dan monitoring yang berdiri sendiri dan terpisah dari rincian output penyelamatan. Pemisahan ini penting untuk menjaga kejelasan logika kinerja serta akurasi pelaporan capaian indikator.

3.1.7.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

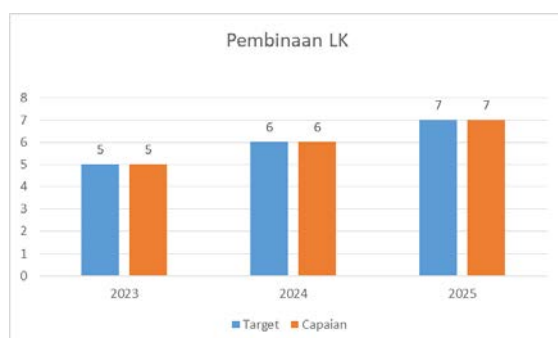
➔ RO 14.1.1. Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi

Kinerja rincian output Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan bagian dari pengukuran IKK Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Indikator tersebut mencerminkan upaya penguatan peran lembaga konservasi dan penangkar TSL nonkomersial dalam mendukung

pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

IKK Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL diukur melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap Lembaga Konservasi (LK) serta penangkar TSL nonkomersial. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan standar konservasi, kesejahteraan satwa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebanyak 5 entitas LK, dan realisasi capaian juga mencapai 5 entitas, sehingga target berhasil dicapai secara penuh. Selanjutnya, pada tahun 2024, target kinerja mengalami peningkatan menjadi 6 entitas LK, sejalan dengan adanya penambahan Izin LK baru di tahun 2024 yaitu Aviary Park. Realisasi pada tahun 2024 menunjukkan capaian 6 entitas, yang kembali memenuhi target yang telah ditetapkan.



Gambar 44. Target dan Realisasi Pembinaan LK

Secara tren, capaian kinerja pada periode tahun 2023–2024 menunjukkan konsistensi, baik dari sisi jumlah entitas yang dibina maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan.

➔ RO 14.1.2. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

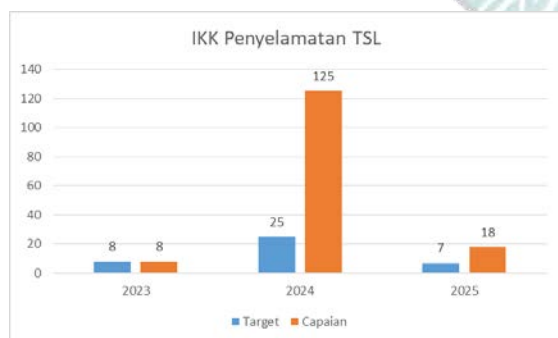
➔ RO 14.1.5. Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

IKK Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan indikator kinerja yang relatif baru, yang mulai dirumuskan dan diimplementasikan sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Revisi 2020–2024. Oleh karena itu, analisis capaian terhadap tahun-tahun sebelumnya hanya dapat dilakukan secara terbatas sejak indikator ini mulai diberlakukan.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 8 kejadian, dan realisasi capaian juga tercatat sebanyak 8 kejadian, sehingga tingkat capaian mencapai 100% dari target tahunan. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi target maupun realisasi. Target kinerja ditetapkan sebesar 25 kejadian, namun realisasi yang dicapai mencapai 125 kejadian, atau capaian maksimal 150% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya intensitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyelamatan jenis

tumbuhan dan satwa liar, sekaligus mencerminkan respons cepat terhadap meningkatnya laporan dan penanganan kasus di lapangan.

Memasuki tahun 2025, terjadi penyesuaian satuan pengukuran kinerja dari sebelumnya berbasis kejadian menjadi berbasis lokasi. Perubahan satuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran kinerja, dengan menekankan pada sebaran wilayah penanganan penyelamatan melalui kegiatan tranlokasi/pelepasliaran satwa. Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja antar tahun perlu memperhatikan perbedaan satuan indikator, sehingga evaluasi difokuskan pada tren peningkatan kualitas dan cakupan kegiatan penyelamatan, bukan semata-mata pada angka kuantitatif.



Gambar 45. Target dan Capaian IKK Penyelamatan TSL 2023-2025

3.1.7.4. Upaya dan Kendala

➔ RO 14.1.1. Optimalisasi
Pengelolaan Lembaga Konservasi

Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan Lembaga Konservasi, Balai KSDA Jakarta telah melakukan upaya pembinaan teknis kepada pengelola lembaga konservasi dan pelaksanaan monitoring dan komunikasi secara berkala. Kendala yang ditemukan saat dilakukan pembinaan LK sebagai berikut:

1) Jakarta Akuarium Indonesia

- Beberapa satwa belum diajukan satwa koleksi baik untuk jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang. Pengajuan ini tidak hanya untuk memastikan legalitas dan ketercataan seluruh satwa dalam izin LK, tetapi juga untuk mempermudah proses tukar-menukar satwa antar LK yang sah, sebagai bagian dari pengelolaan populasi, pengayaan koleksi, dan upaya peningkatan keberagaman spesies dalam kegiatan konservasi ex-situ
- Kewajiban pelaporan triwulan yang terkadang melewati batas waktu. Laporan ini menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan lembaga dan merupakan bagian dari kewajiban administratif pemegang izin
- Pembaruan logbook dan studbook yang belum dilakukan secara rutin dan harian. Logbook

berfungsi sebagai catatan harian individual satwa, sedangkan studbook sebagai basis data keturunan yang penting untuk pengelolaan genetik dan pengambilan keputusan dalam pengembangbiakan.

- Pelaporan setiap kejadian kelahiran dan kematian satwa sebagai pembaruan data populasi dan pengawasan teknis kepada BKSDA Jakarta perlu secara tertulis dan disertai dokumentasi pendukung. Laporan ini penting sebagai dasar verifikasi teknis dan evaluasi kondisi kesehatan serta kesejahteraan satwa di dalam lembaga konservasi.

2) Aviary Park

- Permohonan perolehan satwa koleksi yang tidak dilindungi yang merupakan satwa asli dan satwa asing perlu dilengkapi dengan dokumen asal usul satwa. Dokumen asal usul satwa yang dilampirkan berupa Berita Acara Penitipan BKSDA Jakarta dan nota pembelian.
- Laporan yang disampaikan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK nomor P.22 tahun 2019. PT Aviary juga wajib melaporkan ke petugas BKSDA

setiap ada kelahiran kematian, dan juga pembelian.

3) BXSea

- Beberapa satwa belum diajukan satwa koleksi baik untuk jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang.
- Kewajiban pelaporan triwulan yang terkadang melewati batas waktu
- Pembaruan logbook dan studbook yang belum dilakukan secara rutin dan harian.
- Pelaporan setiap kejadian kelahiran dan kematian satwa sebagai pembaruan data populasi dan pengawasan teknis kepada BKSDA Jakarta perlu secara tertulis dan disertai dokumentasi pendukung.
- Memastikan satwa hibah jenis Penguin Humboldt (*Spheniscus humboldti*) dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru

➔ RO 14.1.2. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

➔ RO 14.1.5. Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Upaya penyelamatan TSL dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan terpadu yang bertujuan menjamin keselamatan satwa, pemulihan kondisi kesehatan, serta keberlanjutan fungsi

konservasi. Salah satu kegiatan utama adalah evakuasi satwa, yang dilakukan sebagai respons cepat terhadap laporan masyarakat maupun temuan di lapangan, terutama pada kasus konflik satwa dengan manusia, satwa terluka, atau satwa yang berada di lokasi tidak aman. Evakuasi dilaksanakan sesuai kaidah teknis untuk meminimalkan risiko terhadap satwa dan petugas.

Setelah evakuasi, dilakukan pemeriksaan kesehatan satwa untuk memastikan kondisi fisik dan status kesehatannya. Pemeriksaan ini menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut penanganan, termasuk kebutuhan perawatan medis, rehabilitasi, atau kesiapan satwa untuk dilepasliarkan atau ditranslokasikan. Satwa hasil penyelamatan yang memerlukan perawatan lanjutan selanjutnya ditempatkan pada Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) untuk dilakukan pemeliharaan sementara, dengan memperhatikan standar kesejahteraan satwa, kecukupan pakan, serta pengawasan kesehatan secara berkala.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan tersebut, dilakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PPS, termasuk kandang, peralatan penanganan satwa, serta fasilitas pendukung lainnya agar tetap layak dan berfungsi optimal. Selain itu, pengadaan obat-obatan dan perlengkapan

medis juga dilakukan guna memastikan penanganan kesehatan satwa dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan.

Sebagai bagian dari upaya pengembalian satwa ke habitat yang lebih sesuai, dilaksanakan kegiatan translokasi satwa, dengan mempertimbangkan aspek ekologis, keamanan, serta kesiapan lokasi tujuan. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan terkoordinasi untuk mendukung kelestarian populasi satwa di alam. Seluruh rangkaian kegiatan penyelamatan TSL tersebut diperkuat melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan satwa, sebagai pedoman teknis dalam menjamin keseragaman, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penyelamatan TSL. Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, upaya penyelamatan TSL diharapkan dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan upaya penyelamatan TSL melalui kegiatan evakuasi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan sementara di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS), hingga translokasi satwa masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis, operasional, maupun kelembagaan. Berikut penjelasan lebih

lanjut terkait pelaksanaan upaya penyelamatan TSL:

- 1) Dalam kegiatan evakuasi satwa, kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan jumlah personel keeper, akses lokasi yang sulit, serta kondisi satwa yang agresif atau stres, sehingga memerlukan penanganan khusus dan berisiko tinggi. Selain itu, tingginya intensitas laporan masyarakat di wilayah urban dapat menyebabkan keterbatasan waktu respon apabila terjadi beberapa kejadian secara bersamaan.
- 2) Pada tahap pemeriksaan kesehatan dan perawatan satwa, keterbatasan tenaga medis satwa, fasilitas klinik, serta ketersediaan alat dan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan. Variasi kondisi kesehatan satwa hasil penyelamatan, termasuk satwa yang mengalami luka berat atau penyakit menular, juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses rehabilitasi.
- 3) Dalam pemeliharaan satwa secara sementara di PPS, kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas kandang, kebutuhan pakan yang beragam sesuai jenis satwa, serta biaya operasional pemeliharaan yang relatif tinggi. Selain itu,

lamanya waktu penitipan satwa akibat keterbatasan lokasi pelepasliaran atau proses administrasi juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya tampung PPS.

- 4) Terkait pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PPS, kendala dapat muncul akibat keterbatasan anggaran, proses pengadaan yang memerlukan waktu, serta kebutuhan pemeliharaan rutin agar sarpras tetap memenuhi standar keselamatan dan kesejahteraan satwa. Hal ini dapat berdampak pada optimalisasi fungsi PPS dalam jangka panjang.
- 5) Dalam pelaksanaan kegiatan translokasi satwa, tantangan yang dihadapi meliputi ketersediaan lokasi tujuan yang sesuai secara ekologis, dan risiko adaptasi satwa pasca-translokasi. Faktor cuaca, kondisi habitat, dan potensi konflik dengan satwa atau manusia di lokasi tujuan juga perlu menjadi perhatian serius.
- 6) Dalam penyusunan dan penerapan SOP penyelamatan satwa, kendala yang mungkin muncul antara lain perlunya penyesuaian SOP dengan dinamika kondisi lapangan, keterbatasan sosialisasi dan pemahaman petugas terhadap

SOP baru, serta kebutuhan evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala agar tetap relevan dan efektif.

3.1.7.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

→ RO 14.1.1. Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi

Pagu anggaran sebagai sumber daya pencapaian target adalah Rp197.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp196.790.900,00 atau persentase realisasi sebesar 99,77%. Persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, memperoleh nilai 0,998 (efisien).

→ RO 14.1.2 Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian target ini sebesar Rp80.426.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.424.009,00 atau persentase realisasi sebesar 100%. Jika persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 1,00 (efisien).

→ RO 14.1.5. Penyelamatan Jenis Tumbu-han dan Satwa Liar

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian target ini sebesar Rp638.448.000,00 dan terealisasi sebesar Rp637.661.197,00 atau persentase realisasi sebesar 99,88%. Jika persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,67 (efisien).

3.1.7.7. Rekomendasi Perbaikan

→ RO 14.1.1. Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Lembaga Konservasi, diperlukan penguatan pada aspek administratif dan teknis yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait ketertiban pelaporan triwulanan, pembaruan logbook dan studbook, serta pelaporan kejadian kelahiran dan kematian satwa secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja pengelolaan, pembaruan data populasi, serta pengawasan kondisi kesehatan dan kesejahteraan satwa di dalam lembaga konservasi.

Selain itu, perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman dan konsistensi pengelola dalam menerapkan standar

pengelolaan yang berlaku. Komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara pengelola LK dan Balai KSDA Jakarta perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, sebagai sarana koordinasi, pendampingan teknis, serta penyelesaian permasalahan secara konstruktif. Dengan penguatan aspek administratif, teknis, dan kemitraan tersebut, diharapkan pengelolaan Lembaga Konservasi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung upaya konservasi ex-situ.

➔ RO 14.1.2. Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati

➔ RO 14.1.5. Penyelamatan Jenis Tumbu-han dan Satwa Liar

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan adaptif terhadap kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1) Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan jumlah dan kompetensi petugas evakuasi serta tenaga medis satwa, termasuk pelatihan teknis penanganan satwa berisiko tinggi dan penanganan darurat kesehatan satwa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan

kecepatan respon dan kualitas penanganan kasus penyelamatan.

2) Diperlukan peningkatan dan penataan kapasitas PPS agar mampu menampung satwa hasil penyelamatan secara proporsional. Upaya ini mencakup pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PPS, penyesuaian kapasitas kandang berdasarkan jenis satwa, serta penguatan manajemen pemeliharaan satwa untuk menjamin standar kesejahteraan satwa tetap terpenuhi. Dukungan kerjasama dan pendanaan dari mitra dapat menjadi alternatif di saat anggaran yang bersumber dari APBN sangat terbatas.

3) Diperlukan penguatan dukungan anggaran baik dari APBN maupun non APBN, khususnya untuk pemenuhan obat-obatan, peralatan medis, pakan satwa, serta sarana penunjang operasional penyelamatan. Optimalisasi perencanaan pengadaan yang berbasis kebutuhan riil lapangan menjadi penting agar proses penanganan satwa tidak terkendala oleh keterbatasan logistik.

4) Dalam pelaksanaan kegiatan translokasi dan pelepasliaran satwa, perlu dilakukan penajaman perencanaan berbasis data

ekologis, termasuk kesiapan habitat tujuan dan mitigasi risiko pasca-translokasi. Selain itu, penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat proses perizinan dan memastikan keberhasilan adaptasi satwa di lokasi tujuan.

- 5) Penyusunan dan penyempurnaan SOP penyelamatan satwa perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. SOP yang disusun hendaknya bersifat aplikatif dan adaptif terhadap dinamika lapangan, serta disertai dengan sosialisasi dan pendampingan kepada petugas agar dapat diterapkan secara konsisten.

- 6) Diperlukan penguatan sistem data dan pelaporan penyelamatan TSL yang terintegrasi, sehingga seluruh kegiatan evakuasi, perawatan, pemeliharaan, dan translokasi dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi dasar evaluasi kinerja serta perumusan kebijakan ke depan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan upaya penyelamatan TSL dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan,

3.1.8. Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan

Sasaran strategis: Meningkatkan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan. Pencapaian IKK Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan didukung oleh 1 (satu) Rincian Output (RO) sebagaimana dalam dokumen PK, yaitu:

→ RO 15.2.1: Layanan Penguatan Pemanfaatan TSL yang berkelanjutan

3.1.8.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Pencapaian target RO “Layanan Penguatan Pemanfaatan TSL yang berkelanjutan” dilakukan melalui kegiatan pembinaan pemegang PB. Kegiatan pembinaan pemegang PB diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pembinaan ini, pemegang izin diharapkan mampu memperbaiki tata kelola usaha, meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan, serta meminimalkan potensi pelanggaran. Dengan demikian, kegiatan pembinaan dapat mendukung

pemanfaatan TSL yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan pemegang PB, jumlah layanan mencapai 1 layanan sesuai dengan target dalam dokumen PK sebanyak 1 layanan. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang direncanakan. Pemegang PB tersebar di Balai KSDA Jakarta dan terbagi ke beberapa Seksi KSDA Wilayah yaitu Seksi KSDA Wilayah 1 (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bekasi), Seksi KSDA Wilayah 2 (Jakarta Barat dan Tangerang), dan Seksi KSDA Wilayah 3 (Jakarta Utara) dengan jumlah perizinan berusaha sebanyak 82 perusahaan.

Jenis PB	Jumlah
Seksi KSDA W1	51
Penangkaran	9
Pengedar	24
Pengedar dan Penangkaran	18
Seksi KSDA W2	20
Penangkaran	2
Penangkaran dan Peragaan	1
Pengedar	17
Seksi KSDA W3	11
Penangkaran	1
Pengedar	10
Grand Total	82

Komoditi PB	Jumlah
Seksi KSDA W1	51
Amfibi, Reptil, Aves, Mamalia	2
Aves	6
Aves dan Mamalia	2
Aves, Reptil, Mamalia	4
Aves, Reptil, Mamalia, Korai	1
Barang jadi dari kulit reptil	3
Cangkang molusca	2
Gaharu	6
Jalak Bali	1
Kayu Sonokeling dan Barang jadi dari kayu sonokeling	1
Korai	10
Kulit Reptil	2
Kulit Reptil dan Aves	1
Kupu-kupu	2
Merak Biru	1
Molusca	1
Reptil	2
Rusa	1
Serangga	1
Tanduk Rusa	1
Teripang	1
Seksi KSDA W2	20
Gaharu	8
Karang Hias	6
Mamalia dan Aves	1
Penangkaran Reptil, Aves, Mamalia, Aphibi, dan Arthropoda	1
Reptil	2
Reptil, Aves, dan Mamalia	1
(blank)	1
Seksi KSDA W3	11
Cycas	1
Eksportir Paha Katak	1
Gaharu	6
Penangkaran burung bengkok	1
Tokek	2
Grand Total	82

Tabel 12. Jenis dan Komoditi Mitra Perizinan Berusaha BKSDA Jakarta

Pencapaian ini diharapkan dapat memberikan positif terhadap layanan terhadap Layanan Penguatan Pemanfaatan TSL yang berkelanjutan melalui peningkatan kepatuhan perizinan, perbaikan tata kelola administrasi dan pelaporan, serta terjaminnya pemanfaatan TSL yang legal, tertib, dan mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Pembinaan Pemegang Perizinan Berusaha

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan kepada pemegang izin penangkaran dan pengedar tumbuhan dan satwa liar (TSL) berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023. Kegiatan ini meliputi pembinaan langsung di lokasi usaha, pemeriksaan kelengkapan administrasi perizinan, sarana dan prasarana, serta pemberian arahan teknis terkait penangkaran, peredaran, pemanfaatan, dan kewajiban pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa secara umum pemegang izin telah memenuhi sebagian besar ketentuan administratif dan teknis yang dipersyaratkan, serta telah tersedia data dan informasi aktual mengenai kondisi pengelolaan usaha penangkaran dan peredaran TSL sebagai bahan evaluasi dan dasar tindak lanjut pembinaan ke depan.



Gambar 46. Pembinaan pemegang perizinan berusaha

3.1.8.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), IKK Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan menetapkan target lima tahunan sebanyak 20 individu. Berdasarkan akumulasi realisasi dari RO tersebut jumlah pemegang perizinan berusaha sebanyak 82 perusahaan sehingga tingkat capaian melebihi target Renstra yang ditetapkan.

Capaian tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan pemegang izin PB. Kegiatan pembinaan pemegang PB berkontribusi dalam memperkuat pemahaman teknis dan keselarasan pelaksanaan pemanfaatan TSL sesuai ketentuan di tingkat operasional. Selain itu, pembinaan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha sehingga kegiatan pemanfaatan dapat berjalan lebih tertib, stabil, dan berorientasi jangka panjang.

3.1.8.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan pembinaan pemegang izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar difokuskan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya awal untuk meningkatkan pemahaman dan

kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikan ketentuan baru. Selanjutnya, pada tahun 2025, kegiatan pembinaan berfokus pada kegiatan operasional melalui pembinaan langsung di lokasi usaha, yang menitikberatkan pada evaluasi pemenuhan administrasi perizinan, sarana dan prasarana, pelaksanaan teknis pemanfaatan, serta kewajiban pelaporan, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berfungsi sebagai penguatan kepatuhan dan perbaikan tata kelola pemanfaatan TSL secara berkelanjutan.

3.1.8.4. Upaya dan Kendala

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemegang izin penangkaran dan pengedar tumbuhan dan satwa liar (TSL), BKSDA Jakarta telah melakukan berbagai upaya melalui pembinaan langsung di lokasi usaha, pemeriksaan kelengkapan administrasi perizinan, sarana dan prasarana, serta pemberian arahan teknis terkait penangkaran, peredaran, pemanfaatan, dan kewajiban pelaporan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023. Upaya tersebut mendorong pemegang izin untuk lebih memahami kewajiban perizinan dan meningkatkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah kendala, antara lain adanya ketidaksesuaian dokumen legalitas asal-usul TSL dari negara asal, realisasi pemanfaatan yang belum sepenuhnya didukung penjelasan administratif, serta dinamika kerja sama usaha yang memengaruhi keberlanjutan izin, sehingga diperlukan penguatan pembinaan yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kualitas administrasi serta koordinasi dengan instansi terkait.

3.1.8.5. Outcome

Outcome dari kegiatan pembinaan pemegang Perizinan Berusaha (PB) berupa tersusunnya gambaran tingkat kepatuhan dan kondisi pengelolaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) pada pemegang izin di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta secara lebih akurat dan terukur. Kegiatan ini menghasilkan satu layanan pembinaan sesuai target kinerja, sekaligus menyediakan data dan informasi aktual mengenai pemenuhan ketentuan administrasi, teknis, sarana prasarana, serta kewajiban pelaporan oleh pemegang izin penangkaran dan pengedar TSL. Hasil pembinaan menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang izin telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan

penguatan dan perbaikan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi dasar evaluasi dan penentuan tindak lanjut pembinaan ke depan, sehingga berfungsi sebagai acuan dalam peningkatan kualitas layanan penguatan pemanfaatan TSL yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

3.1.8.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian IKK ini sebesar Rp. Rp210.090.000,00 dan terealisasi sebesar 206.639.716,00 atau persentase realisasi sebesar 98,36%, sehingga nilai efisiensi IKK ini sebesar 0,98 (efisien).

3.1.8.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Ke depan, kegiatan pembinaan pemegang izin penangkaran dan pengedar TSL perlu direncanakan dan dilaksanakan secara lebih intensif dan berkelanjutan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas administrasi perizinan dan pelaporan yang disertai bukti dukung yang lengkap. Diperlukan pula penguatan pendampingan teknis kepada pemegang izin, khususnya terkait penelusuran dan keabsahan dokumen legalitas asal-usul TSL serta kesesuaian realisasi

pemanfaatan dengan izin yang dimiliki. Selain itu, peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antara pemegang izin dan instansi berwenang perlu terus didorong agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini, sehingga keberlanjutan usaha dan tujuan pelestarian keanekaragaman hayati dapat tercapai secara seimbang.

3.1.9. IKK Nilai Maturitas SPIP

Sasaran Strategis: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

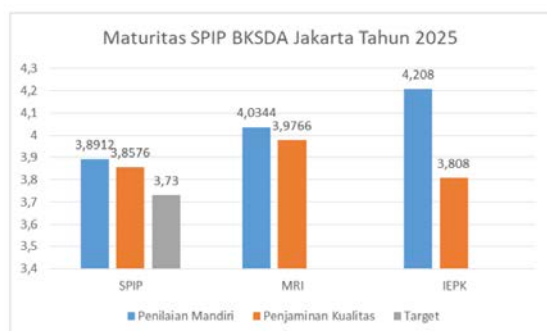
Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan atau kemapanan dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam suatu organisasi atau entitas pemerintah. SPIP adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maturitas SPIP mengacu pada seberapa baik dan seberapa efektif suatu organisasi telah mengimplementasikan komponen-komponen SPIP. Tingkat maturitas seringkali dievaluasi untuk menentukan area yang memerlukan

perbaikan, sekaligus menilai apakah pengendalian intern yang ada sudah memadai untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh organisasi.

3.1.9.1. Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Pada tahun 2025, target nilai maturitas SPIP yang ditetapkan adalah sebesar 3,73 poin. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, capaian realisasi nilai maturitas SPIP BKSDA Jakarta mencapai 3,8912 poin, atau melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun hasil penjaminan kualitas (PK) yang dilakukan oleh Tim dari Inspektorat Jenderal kementerian Kehutanan nilai maturitas SPIP BKSDA Jakarta sebesar 3,8576 atau sebesar 103,42% dari target. Nilai indikator lainnya yang berkaitan dengan maturitas SPIP yaitu MRI (Maturity Risk Index) dan IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 47. Maturitas SPIP BKSDA Jakarta tahun 2025

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur SPIP, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, telah berjalan secara konsisten dan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3.1.9.2. Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Target lima tahunan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah mencapai nilai 3,85 pada tahun 2029. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, capaian nilai indikator telah mencapai 3,8576, yang secara numerik telah melampaui target akhir lima tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2029. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem, kebijakan, dan praktik pengelolaan organisasi telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang signifikan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Meskipun target akhir lima tahunan telah tercapai lebih awal, BKSDA Jakarta tetap perlu menjaga konsistensi penerapan dan melakukan penguatan berkelanjutan, khususnya dalam aspek inovasi, integrasi sistem, dan pengelolaan risiko yang dinamis. Ke depan, capaian ini dapat

dijadikan sebagai baseline untuk penetapan target yang lebih menantang, sekaligus sebagai landasan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

3.1.9.3. Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun capaian nilai maturitas SPIP pada tahun 2023 sampai dengan 2025 ditunjukkan pada gambar XX di bawah ini. Data sebelum tahun 2023 tidak tersedia, karena penilaian mandiri SPIP oleh satker baru mulai dilakukan pada tahun 2023 tersebut.



Gambar 48. Nilai SPIP, MRI dan IEPK BKSDA Jakarta tahun 2023-2025

Berdasarkan grafik di atas terdapat tren kenaikan nilai SPIP dan IEPK dalam kurun waktu 3 tahun. Sedangkan pada nilai MRI, pada tahun 2024 mengalami penurunan nilai, namun kemudian di tahun 2025 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

3.1.9.4. Upaya dan Kendala

Dalam rangka meningkatkan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BKSDA Jakarta telah melaksanakan berbagai upaya yang terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat seluruh unsur SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, hingga pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Upaya peningkatan nilai maturitas SPIP dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan pendukung, antara lain:

Penyusunan dan sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Pegawai, sebagai langkah penguatan lingkungan pengendalian dan pembangunan budaya integritas, guna memastikan seluruh pegawai memahami serta menerapkan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas.

Workshop manajemen risiko dan mitigasi risiko program/kegiatan, yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah mitigasi risiko, sehingga pengelolaan program dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terencana dan berbasis risiko. Kegiatan pengendalian fisik atas Barang Milik Negara (BMN), melalui penataan, pengamanan, dan penertiban aset,

sebagai bentuk penguatan kegiatan pengendalian untuk menjaga keandalan pengelolaan aset negara serta mencegah potensi kehilangan atau penyalahgunaan. Peningkatan sistem informasi manajemen internal, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi SMART Patrol dan SIPINTER, yang mendukung pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan secara lebih akurat, transparan, dan tepat waktu, sekaligus memperkuat unsur informasi dan komunikasi dalam SPIP.

Monitoring capaian maturitas SPIP serta tindak lanjut rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal, sebagai bagian dari unsur pemantauan pengendalian intern, guna memastikan bahwa hasil evaluasi dan pengawasan ditindaklanjuti secara konsisten dan berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan peningkatan maturitas SPIP masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi pegawai terkait SPIP dan manajemen risiko, yang memerlukan proses internalisasi dan pendampingan secara berkelanjutan.
- Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi dan monitoring secara menyeluruh, terutama di tengah tingginya beban tugas teknis lapangan.

- Belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi antarunit kerja, sehingga masih diperlukan penyesuaian dan penguatan koordinasi dalam pemanfaatan sistem manajemen internal. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang memerlukan koordinasi lintas unit dan konsistensi pelaksanaan, sehingga pada beberapa aspek membutuhkan waktu lebih panjang untuk diselesaikan secara tuntas.

3.1.9.5. Outcome

Capaian nilai Maturitas SPIP BKSDA Jakarta yang telah melampaui target yang ditetapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Outcome utama dari capaian ini adalah semakin menguatnya sistem pengendalian intern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKSDA Jakarta secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penerapan SPIP yang berada pada tingkat kematangan tinggi telah mendorong terbentuknya lingkungan pengendalian yang berintegritas, ditandai dengan implementasi Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang semakin dipahami dan dijalankan secara konsisten. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan serta menurunnya potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, penguatan manajemen risiko melalui workshop dan penerapan mitigasi risiko program/kegiatan telah menghasilkan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih antisipatif dan berbasis risiko. Outcome ini tercermin pada meningkatnya kemampuan unit kerja dalam mengidentifikasi risiko strategis dan operasional sejak tahap perencanaan, sehingga kualitas pengambilan keputusan pimpinan menjadi lebih tepat dan terukur.

Pada aspek pengendalian dan pengelolaan aset, kegiatan pengendalian fisik atas Barang Milik Negara (BMN) berdampak pada meningkatnya keandalan data aset serta tertib administrasi pengelolaan BMN. Kondisi ini mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara, sekaligus meminimalkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset.

Pemanfaatan sistem informasi manajemen internal, seperti SMART Patrol dan SIPINTER, turut memberikan outcome berupa meningkatnya transparansi, ketertelusuran data, serta kecepatan dan akurasi pelaporan kinerja dan pengawasan. Sistem tersebut mendukung komunikasi internal yang lebih efektif dan menjadi alat bantu penting dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian nilai maturitas SPIP BKSDA Jakarta berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kualitas pengawasan intern dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal. Outcome ini memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja BKSDA Jakarta serta menjadi fondasi yang kokoh dalam mendukung pencapaian tujuan konservasi sumber daya alam hayati secara berkelanjutan.

3.1.9.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu anggaran yang tersedia sebagai sumber daya pencapaian target ini sebesar Rp17.468.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.461.496.520,00 atau persentase realisasi sebesar 99,96%. Jika persentase capaian output dibandingkan dengan persentase capaian anggaran tahun 2025, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,97 (efisien).

3.1.9.7. Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Meskipun nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKSDA Jakarta telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, upaya perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan

serta meningkatkan kualitas pengendalian intern secara menyeluruh. Rekomendasi perbaikan ke depan antara lain:

Penguatan internalisasi SPIP dan manajemen risiko perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, pendampingan, dan pembelajaran berbasis praktik (on the job training), khususnya bagi pegawai baru dan unit kerja dengan tingkat risiko tinggi.

Peningkatan kualitas manajemen risiko program dan kegiatan perlu difokuskan pada penguatan keterkaitan antara peta risiko, rencana mitigasi, dan pengambilan keputusan pimpinan. Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian serta ketepatan pencapaian sasaran kinerja.

Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen internal, seperti SMART Patrol dan SIPINTER, perlu terus didorong melalui peningkatan kualitas data, integrasi antar-sistem, serta penguatan kapasitas operator. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, ketertelusuran, dan keandalan informasi sebagai dasar pengawasan dan pelaporan kinerja.

Penguatan pengendalian atas pengelolaan BMN perlu dilakukan secara konsisten melalui pemutakhiran data aset, pengamanan fisik, dan penertiban administrasi secara berkala. Upaya ini

menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara serta meminimalkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan.

Peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPK dan Inspektorat Jenderal perlu didukung dengan mekanisme monitoring yang lebih terstruktur dan terukur, termasuk penetapan penanggung jawab yang jelas serta tenggat waktu penyelesaian. Dengan demikian, hasil pengawasan dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan sistem dan proses kerja.

Melalui pelaksanaan rekomendasi tersebut, BKSDA Jakarta diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan nilai maturitas SPIP yang telah dicapai, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian intern secara berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian kinerja konservasi yang efektif, berintegritas, dan akuntabel.

3.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

3.2.1. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Balai KSDA Jakarta tahun 2025 setelah revisi sebesar Rp19.479.603.000,00 dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp17.751.455.000,00 dan sumber dana PNPB sebesar Rp1.728.148.000,00.

Jenis Belanja	Keterangan	Sumber Dana		Total
		Rupiah Murni (RM)	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
Pegawai	Pagu	13.955.980.000	-	13,955,980,000
	Realisasi	13.954.489.906	-	13,954,489,906
	%	99.99%	0.00%	99.99 %
	Sisa	1.490.094	-	1.490.094
Barang	Pagu	3.760.476.000	1.572.886.000	5.333.362.000
	Realisasi	3.752.302.605	1.568.245.547	5.320.548.152
	%	99.78%	99.70%	99.76 %
	Sisa	8.173.395	4.640.453	12.813.848
Modal	Pagu	34.999.000	155.262.000	190.261.000
	Realisasi	34.999.000	155.000.100	189.999.100
	%	100.00%	99.83%	99.86 %
	Sisa	0	261.900	261.900
Total	Pagu	17.751.455.000	1.728.148.000	19.479.603.000
	Realisasi	17.741.791.511	1.723.245.647	19.465.037.158
	%	99.95%	99.72%	99.93%
	Sisa	9.663.489	4.902.353	14.565.842

Tabel 12. Realisasi anggaran per jenis belanja dan per sumber dana TA 2025

Pagu anggaran mengalami penambahan dari pagu/DIPA awal BKSDA Jakarta tahun anggaran 2025 sebesar Rp17.927.785.000,00 atau bertambah Rp1.551.818.000,00.

Karena kebijakan memenuhi kekurangan belanja pegawai dengan adanya rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap IV. Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.465.037.158,00 (99.93%) (Sumber: OM-SPAN, 9 Januari 2026). Persentase realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 99,67%.

Jika dilihat dari jenis belanja, persentase terkecil pada belanja barang yang hanya 99,76%. Adapun kronologis rendahnya penyerapan belanja barang sebagai berikut:

1. Pagu awal belanja barang Balai KSDA Jakarta sebesar Rp7.072.350.000 yang bersumber dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.589.350 dan sumber dana PNPB sebesar Rp1.483.000.000.

2. Sesuai dengan Memorandum Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor: M.14/SETKSDAE/REN.2/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal Efisiensi Belanja APBN Direktorat Jenderal KSDAE TA 2025 disampaikan untuk melakukan revisi efisiensi belanja APBN lingkup Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Memorandum Menteri Kehutanan Nomor: M.3/MENHUT/ROCAN/REN.0/2/2025 tanggal 11 Februari 2025 hal Efisiensi Belanja APBN Kementerian Kehutanan TA 2025.
3. Jumlah anggaran yang dikenakan Efisiensi yaitu sebesar Rp3.380.047.000,00 yang terdiri dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan senilai Rp731.047.000,00, dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp2.649.000.000,00.
4. Berdasarkan Memorandum Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor: M.33/KSDAE/SKSDAE/REN.03/4/2025 tanggal 9 April 2025 hal Relaksasi Blokir Efisiensi dan Anggaran Belanja Tambahan Ditjen KSDAE TA.2025 sebagai tindak lanjut dari

Surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan Nomor: S.51/MENHUT/SETJEN/REN.01/3/2025 tanggal 3 Maret 2025 hal Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025 disampaikan untuk melakukan revisi Relaksasi Blokir Efisiensi dan Anggaran Belanja Tambahan lingkup Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan, besaran ABT BKSDA Jakarta yaitu sebesar Rp2.745.185.000 yang terdiri dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp1.320.620.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.424.565.000.

Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh penerimaan sebesar Rp1.285.339.463,00 (177.13%) dari target Rp725.650.000,00.



Gambar 49. Penerimaan PNBP Tahun 2025

3.2.2. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran dari aplikasi SMART.



Gambar 50. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai KSDA Jakarta TA

Berdasarkan data dari aplikasi SMART DJA (tanggal 9 Januari 2026), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Balai KSDA Jakarta tahun 2025 adalah 90,21

(kategori sangat baik) berdasarkan penjumlahan 50% dari Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 87,84, dan 50% dari Nilai Pelaksanaan Anggaran sebesar 92,57.

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
Balai KSDA Jakarta	87,84	92,57	90,21

Tabel 13. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Balai KSDA Jakarta TA 2025

Jika dibandingkan NKA tahun 2024 sebesar 98,66, capaian NKA tahun 2025 sebesar 90,21 mengalami penurunan sebesar 8,45 poin.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan umum dan capaian kinerja

Secara umum, kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik, efektif dan akuntabel, baik dari sisi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun pengelolaan anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama Rencana Strategis BKSDA Jakarta Tahun 2025–2029 berjalan selaras dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan kebijakan Kementerian Kehutanan. Capaian kinerja organisasi tercermin melalui realisasi seluruh IKK yang telah memenuhi target. Dengan rincian:

- IKK 1: Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pelaksanaan dukungan manajemen dan tata kelola organisasi berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian seluruh program dan kegiatan. Target IKK ini adalah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau diperoleh capaian 100%.

- IKK 2: Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan melalui penilaian efektivitas pengelolaan pada 2 unit kawasan konservasi, dengan realisasi 100%, sebagai dasar penguatan tata kelola kawasan.

- IKK 3: Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Pelibatan dan pembinaan masyarakat menunjukkan hasil yang sangat baik. Target keterlibatan masyarakat sebesar 100% terealisasi hingga 150%, sementara pembinaan 3 kelompok masyarakat binaan terealisasi 100%.

- IKK 4: Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan PNBP

Pemanfaatan jasa lingkungan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PNBP. Target penerimaan PNBP tahunan berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 177,13%, serta memperluas fungsi kawasan konservasi sebagai ruang edukasi dan jasa lingkungan.

- IKK 5: Pengembangan Areal Preservasi

Dari target sekitar 100 hektare, pengembangan areal preservasi terealisasi sebesar 150,55 hektare atau

150%, sebagai capaian strategis awal implementasi kebijakan areal preservasi.

- **IKK 6: Pemulihan Ekosistem**

Pemulihan ekosistem dilaksanakan sesuai target tahunan dan terealisasi melebihi target (>100%), didukung oleh pengendalian tumbuhan invasif, pemeliharaan tanaman, serta penanaman pengkayaan melalui kolaborasi multipihak.

- **IKK 7: Pendataan dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar**

Kegiatan pendataan dan penyelamatan tumbuhan dan satwa liar menunjukkan responsivitas tinggi terhadap dinamika konservasi di wilayah urban. Target lokasi penyelamatan tahunan berhasil dilampaui dengan capaian 150%, serta penanganan terhadap 236 individu satwa sepanjang tahun berjalan.

- **IKK 8: Peningkatan jumlah individu TSL dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan**

Kegiatan peningkatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dari hasil penangkaran dilaksanakan melalui pembinaan pemegang Perizinan Berusaha (PB) untuk mendorong pemanfaatan TSL yang tertib, legal, dan berkelanjutan. Target layanan

pembinaan tahunan sebanyak 1 layanan berhasil direalisasikan 100%, dengan pembinaan terhadap 82 pemegang izin, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan perizinan dan kualitas tata kelola pemanfaatan TSL.

Dari sisi tata kelola, kinerja pengelolaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi anggaran mencapai 99,93%, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta konsistensi pengendalian anggaran. Penerimaan PNBPN juga melampaui target, yang menunjukkan optimalisasi pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan layanan konservasi sesuai ketentuan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025 tercatat sebesar 90,21 dengan kategori sangat baik, yang menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya yang juga berada pada kategori sangat baik. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa BKSDA Jakarta mampu mencapai target kinerja organisasi secara optimal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sebagai fondasi pelaksanaan Renstra 2025–2029.

4.2. Permasalahan dan Langkah ke Depan

Di balik capaian kinerja tersebut, pelaksanaan setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara sistematis sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan dalam periode Rencana Strategis 2025–2029.

- IKK 1 masih menghadapi tantangan dalam penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, integrasi sistem pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ke depan, langkah diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi, penyempurnaan sistem manajemen kinerja, dan optimalisasi dukungan anggaran.
- IKK 2 menghadapi tantangan meningkatnya tekanan aktivitas manusia, keterbatasan ruang, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola kawasan sesuai standar penilaian efektivitas terbaru. Langkah ke depan meliputi penguatan perencanaan berbasis risiko, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
- IKK 3 menghadapi tantangan keberlanjutan peran dan manfaat ekonomi masyarakat binaan. Ke

depan, dilakukan penguatan pendampingan berkelanjutan, pengembangan usaha ekonomi berbasis konservasi, serta peningkatan kualitas kemitraan masyarakat.

- IKK 4 masih dihadapkan pada keterbatasan ruang inovasi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi perkotaan. Langkah ke depan diarahkan pada pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan yang adaptif, peningkatan kualitas layanan edukasi konservasi, serta penguatan kerja sama dengan mitra strategis untuk mendukung peningkatan PNBSP.
- IKK 5 menghadapi tantangan integrasi pengembangan areal preservasi dengan tata ruang wilayah serta kepastian pengelolaan jangka panjang. Upaya ke depan difokuskan pada penguatan basis data spasial, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyusunan rencana pengelolaan yang terintegrasi dengan Renstra 2025–2029.
- IKK 6 masih dihadapkan pada tekanan lingkungan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya. Langkah ke depan diarahkan pada penerapan pendekatan pemulihan

berbasis ekosistem, peningkatan kolaborasi multipihak, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

- IKK 7 menghadapi tantangan meningkatnya interaksi manusia dan satwa liar di wilayah urban yang menuntut penguatan sistem penyelamatan dan pendataan. Ke depan, dilakukan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM, penyempurnaan SOP, serta penguatan sistem data keanekaragaman hayati.
- IKK 8 menghadapi tantangan meningkatnya interaksi manusia dan satwa liar di wilayah urban yang menuntut penguatan sistem penyelamatan dan pendataan. Ke depan, dilakukan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan SDM, penyempurnaan SOP, serta penguatan sistem data keanekaragaman hayati.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja per IKK, pengelolaan anggaran ke depan akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029, melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi guna menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan kinerja organisasi.



Gambar 51. Raja udang biru (*Alcedo coerulescens*) di TWA Angke Kapuk